



YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 184 TAHUN 2026

TENTANG

KURIKULUM PERGURUAN TINGGI (KPT) BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan Program Studi Ilmu Politik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkompeten dan berkualitas, dan berdampak maka diperlukan penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) berbasis Outcome Based Education (OBE);
- c. Bahwa penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Rektor Nomor 184 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Implementasi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian serta Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu Pendidikan Tinggi UWKS;
 8. Keputusan Rektor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan SKS Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
 9. Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 10. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 142 Tahun 2026 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
 11. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 170 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

Memperhatikan : Surat Dekan FISIP Nomor : 329/FISIP/UWKS/VII/2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kurikulum Program Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG KURIKULUM PERGURUAN TINGGI (KPT) BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2026**
- Pertama : Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) Berbasis Outcome Based Education (OBE) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kurikulum Program Studi Ilmu Politik sebagaimana diktum Pertama disusun dengan struktur sebagai berikut::
- I. Identitas Program Studi;

- II. Evaluasi Kurikulum Dan Tracer Study;
- III. Landasan Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum;
- IV. Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi;
- V. Body Of Knowledge Program Studi;
- VI. Persyaratan Lulus;
- VII. Standar Kompetensi Lulusan;
- VIII. Matriks dan Peta Kurikulum;
- IX. Penetapan Bahan Kajian, Pembentukan Mata Kuliah, dan Struktur Mata Kuliah;
- X. Struktur Mata Kuliah;
- XI. Rencana Implementasi Hak Belajar di Luar Program Studi;
- XII. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum;
- XIII. Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru

Ketiga : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilengkapi dengan instrumen pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak kuliah, bahan ajar, buku ajar, SOP, dan Pedoman Pelaksanaan secara teknis diatur dengan Keputusan Dekan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 19 Agustus 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, MSi.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;
 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 3. Ketua Lembaga / Badan;
 4. Kepala Biro Administrasi Akademik;
 5. Kepala UPT TIK;
 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : 184 Tahun 2026
Tanggal : 19 Agustus 2026

**KURIKULUM PERGURUAN TINGGI (KPT)
BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)**

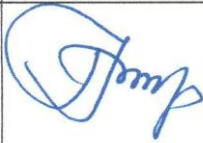


**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2026**

**KURIKULUM PERGURUAN TINGGI (KPT)
BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION***

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2026**



PENGESAHAN				
	Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Diperiksa oleh	Disahkan Oleh
Jabatan	Ka. Prodi	Dekan Fakultas	Ketua BP3	Rektor
Tanda Tangan				
Nama	Dr. Darsono, Drs., M.Si.	Dr. Sugeng Pujileksono, M.Si	Prof. Dr. Ir. H. Ismanto Hadi Santoso, MS	Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si
Tanggal Terbit				
Revisi	00			

Copyright 2026: Dokumen ini adalah bersifat rahasia, Penggandaan dokumen ini harus seijin Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

I. IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Institusi	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
2	Nama Program Studi	Sarjana Ilmu Politik
3	Jenjang Pendidikan	S1
4	Alamat Program Studi	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya
5	Status Akreditasi beserta Badan Akreditasinya, misal BAN-PT, LAM	Unggul
6	Gelar/Sebutan Lulusan	Sarjana Ilmu Politik (S.I.Pol)
7	Visi Program Studi	Menjadi program studi yang memiliki kompetensi kajian konsep teoritis di bidang manajemen pemerintahan, tata kelola partai dan pemilihan serta advokasi sosial masyarakat.
8	Misi Program Studi	1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Politik yang mengedepankan nilai-nilai integritas, intelektualitas dan demokrasi. 2. Memperkuat tri dharma perguruan tinggi yang memiliki fokus pada tiga kajian yaitu manajemen pemerintahan, tata kelola partai politik dan pemilu serta advokasi sosial masyarakat. 3. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Politik yang mencakup kajian manajemen pemerintahan, tata kelola partai dan pemilihan berbasis pada pengembangan konsep pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka
9	Capaian Pembelajaran Lulusan	1. Mampu menunjukkan sikap profesional, berintegritas, menjunjung tinggi nilai agama, etika akademik, nilai-nilai Kewijayakusumaan, demokrasi, hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, serta semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan konsep, teori, serta pendekatan ilmu politik untuk memahami

		fenomena politik, demokrasi, pemerintahan, kebijakan publik, hubungan negara dan masyarakat, serta dinamika politik lokal, nasional, dan global secara kritis, komprehensif, dan berwawasan global. 3. Mampu menerapkan metode penelitian ilmu politik, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan analisis data dalam menghasilkan kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, dan solusi berbasis bukti (evidence-based policy) yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. Mampu menganalisis, merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, demokrasi, pemilihan, dan kepartaian secara profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat. 5. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat, penguatan civil society, advokasi sosial-politik, serta pembangunan partisipatif yang mendukung demokrasi, pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. 6. Mampu memanfaatkan teknologi digital, komunikasi politik, media sosial, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence), dan inovasi sosial secara etis, adaptif, dan bertanggung jawab dalam analisis politik, tata kelola pemerintahan, pendidikan politik, serta penguatan partisipasi masyarakat di era transformasi digital. 7. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisiplin, menunjukkan kepemimpinan, beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun jejaring kerja sama nasional dan internasional untuk mendukung profesionalisme di bidang politik, pemerintahan, dan organisasi masyarakat. 8. Mampu mengembangkan inovasi serta menghasilkan solusi kreatif terhadap berbagai persoalan politik, pemerintahan, demokrasi, dan pembangunan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, berbasis
--	--	--

		riset, berorientasi pada kemajuan bangsa, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
10	Lama Studi dan jumlah beban studi (sks)	8 Semester, 144 SKS
11	Status Usulan a. Baru b. Redisain	Redisain

II. EVALUASI KURIKULUM DAN *TRACER STUDY*

2.1 Evaluasi Kurikulum

Berdasarkan evaluasi dokumen kurikulum MBKM Program Studi S1 Ilmu Politik UWKS tahun 2021, terdapat beberapa kekuatan mendasar, namun juga terdapat sejumlah aspek yang perlu direkonstruksi agar lebih selaras dengan paradigma *Outcome Based Education* (OBE) mutakhir dan tren kurikulum Ilmu Politik nasional pasca-MBKM.

Tabel 1. Rekomendasi Transformasi Kurikulum UWKS

Bidang Pengembangan	Rekomendasi
Profil lulusan	Tambahkan political analyst, digital political communicator, sociopolitical entrepreneur
CPL berbasis OBE	Gunakan kata kerja performatif: menganalisis, mengevaluasi, merancang
Digitalisasi	Tambahkan Politik Digital, AI dan Demokrasi, Political Media Analytics
Data politics	Tambahkan Political Data Analytics dan Computational Politics
Research ecosystem	Bangun laboratorium politik dan policy research center
MBKM	Kembangkan project-based MBKM dan civic innovation
Employability	Integrasikan public affairs, policy brief, lobbying, strategic communication
Kampus berdampak	Bangun pusat demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat

Secara umum, implementasi kurikulum Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menunjukkan bahwa program studi telah melakukan adaptasi terhadap kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), namun implementasinya masih berada pada fase “MBKM administratif” dan belum sepenuhnya berkembang menjadi “Outcome Based Education (OBE) strategis berbasis outcome profesi dan kompetensi abad ke-21”. Pernyataan ini penting dipahami bukan sebagai bentuk kegagalan implementasi kurikulum, melainkan sebagai gambaran bahwa transformasi pendidikan tinggi di Indonesia memang sedang berada pada fase transisi dari paradigma pembelajaran konvensional menuju paradigma pendidikan tinggi modern yang lebih adaptif, berbasis kompetensi, digital-oriented, dan employability-oriented.

Perbandingan kurikulum Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) dengan beberapa program studi ilmu politik di perguruan tinggi lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Surabaya menunjukkan bahwa setiap program studi memiliki karakteristik, orientasi, dan paradigma pengembangan kurikulum yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejarah institusi, tradisi akademik, orientasi keilmuan, kebutuhan pasar kerja, serta strategi pengembangan masing-masing perguruan tinggi dalam menghadapi transformasi pendidikan tinggi berbasis Outcome Based Education (OBE), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), digitalisasi, dan paradigma “kampus berdampak”.

Secara umum, perkembangan kurikulum ilmu politik di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya kurikulum ilmu politik cenderung berfokus pada penguasaan teori politik dan sistem pemerintahan secara normatif, maka saat ini mayoritas program studi mulai mengarahkan kurikulumnya pada

pengembangan kompetensi profesional, kemampuan analitis, keterampilan digital, serta kesiapan dunia kerja. Perubahan tersebut terjadi seiring meningkatnya kebutuhan terhadap lulusan yang tidak hanya memahami teori politik, tetapi juga mampu bekerja dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, lembaga kebijakan publik, organisasi masyarakat sipil, media digital, konsultan politik, hingga industri data dan komunikasi politik.

Dalam konteks tersebut, Universitas Indonesia dapat dikatakan sebagai representasi model kurikulum ilmu politik berbasis analytical political science. Kurikulum ilmu politik UI memiliki orientasi yang sangat kuat pada pengembangan kemampuan analisis politik, metodologi penelitian, policy studies, dan governance studies. Mahasiswa dilatih untuk memahami politik sebagai sebuah disiplin ilmu yang berbasis riset, argumentasi akademik, dan analisis struktural. Pendekatan yang digunakan UI cenderung menempatkan ilmu politik sebagai scientific discipline yang menuntut mahasiswa mampu membaca relasi kekuasaan, perilaku politik, kebijakan publik, dan dinamika institusi secara kritis dan metodologis.

Kekuatan utama kurikulum UI terletak pada pengembangan analytical reasoning dan research capacity. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori politik klasik dan kontemporer, tetapi juga dibekali kemampuan metodologi kuantitatif, metodologi kualitatif, analisis kebijakan, political economy, hingga governance analysis. Pendekatan ini menghasilkan lulusan yang relatif kuat dalam bidang riset, analisis kebijakan, dan pengembangan argumentasi akademik. Oleh karena itu, banyak lulusan UI yang bekerja sebagai policy analyst, peneliti, akademisi, konsultan kebijakan, ataupun governance specialist.

Selain itu, UI juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup baik terhadap perkembangan politik digital dan transformasi teknologi. Kurikulum mulai mengintegrasikan isu-isu seperti digital democracy, media politics, governance innovation, dan political communication berbasis media digital. Hal ini menunjukkan bahwa UI tidak hanya mempertahankan tradisi analytical political science, tetapi juga mulai mengembangkan pendekatan ilmu politik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja.

Sementara itu, Universitas Gadjah Mada memiliki karakter kurikulum yang sedikit berbeda dibanding UI. Jika UI sangat kuat pada analytical political science, maka UGM lebih menonjol dalam pendekatan interdisciplinary governance dan problem solving. Kurikulum ilmu politik UGM cenderung mengintegrasikan ilmu politik dengan kajian kebijakan publik, pembangunan, demokrasi, governance, civil society, hingga isu global. Pendekatan yang digunakan lebih multidisipliner dan kontekstual terhadap persoalan sosial-politik di Indonesia.

Kekuatan utama kurikulum UGM adalah kemampuan menghubungkan teori politik dengan problem sosial nyata. Mahasiswa tidak hanya diajak memahami konsep-konsep politik, tetapi juga didorong untuk mencari solusi terhadap persoalan demokrasi, tata kelola pemerintahan, ketimpangan sosial, konflik politik, dan transformasi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma “kampus berdampak” yang saat ini menjadi arah kebijakan pendidikan tinggi nasional.

UGM juga termasuk salah satu kampus yang relatif progresif dalam mengintegrasikan digitalisasi dan inovasi ke dalam kurikulum ilmu politik. Penguatan governance innovation, policy innovation, digital democracy, dan riset sosial berbasis data menjadi bagian penting dalam pengembangan kompetensi mahasiswa. Dengan demikian, lulusan UGM memiliki kombinasi antara kemampuan analitis, sensitivitas sosial, dan kemampuan problem solving yang cukup kuat.

Di sisi lain, Universitas Brawijaya menunjukkan karakter kurikulum yang lebih research-based dan methodological-oriented. Kurikulum ilmu politik UB sangat menekankan penguatan metodologi penelitian, analytical politics, dan political research. Mahasiswa didorong untuk memiliki kemampuan penelitian yang kuat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, penguatan metodologi, statistik politik, dan penelitian empiris menjadi salah satu ciri utama kurikulum UB.

Dalam konteks implementasi OBE, UB juga terlihat cukup serius mengembangkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran dan kompetensi profesi. Kurikulum mulai diarahkan pada pengembangan employability, analytical skill, dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, UB juga mulai mengintegrasikan pengembangan soft skills dan kemampuan komunikasi akademik ke dalam struktur kurikulumnya. Pendekatan ini menjadikan lulusan UB relatif kompetitif dalam bidang penelitian, kebijakan publik, maupun sektor profesional lain yang membutuhkan kemampuan analitis.

Sementara itu, Universitas Negeri Surabaya memiliki karakter kurikulum yang lebih adaptif dan applied-oriented. Sebagai perguruan tinggi negeri yang berkembang dalam konteks pendidikan terapan dan MBKM, UNESA mulai mengarahkan kurikulum ilmu politiknya pada pengembangan keterampilan praktis, komunikasi politik digital, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial-politik. Kurikulum UNESA terlihat lebih dekat dengan kebutuhan industri politik dan komunikasi publik kontemporer dibanding beberapa kampus lain yang masih sangat teoritis.

UNESA juga menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mengintegrasikan digital politics dan komunikasi politik digital ke dalam kurikulum. Penguatan media sosial, komunikasi politik, branding politik, dan political communication menjadi bagian dari strategi pengembangan kompetensi mahasiswa. Pendekatan ini cukup relevan dengan perkembangan politik kontemporer yang semakin dipengaruhi oleh media digital dan teknologi komunikasi.

Apabila dibandingkan dengan keempat universitas tersebut, Program Studi Ilmu Politik UWKS memiliki posisi yang cukup unik. Kurikulum UWKS tidak sepenuhnya berada pada model analytical political science seperti UI, tidak pula seinterdisipliner UGM, tidak terlalu research-heavy seperti UB, maupun tidak sepenuhnya applied-digital seperti UNESA. UWKS justru memiliki karakter yang lebih dekat pada politik praksis, demokrasi lokal, kepartaian, sistem pemilu, dan pemberdayaan masyarakat.

Kekuatan utama kurikulum UWKS terletak pada kedekatannya dengan civil society dan demokrasi lokal. Mata kuliah seperti Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia, Politik Pemberdayaan Masyarakat, Gerakan Sosial Politik Indonesia, Politik Pemerintahan Desa, serta Internship Legislatif menunjukkan bahwa kurikulum UWKS memiliki orientasi kuat pada praktik demokrasi dan pemberdayaan sosial. Dalam konteks tertentu, karakter ini menjadi keunggulan tersendiri karena tidak semua program studi ilmu politik di Indonesia memiliki fokus yang cukup kuat pada isu akar rumput dan masyarakat sipil.

Selain itu, implementasi MBKM di UWKS juga cukup progresif pada level administratif dan fleksibilitas pembelajaran. Program studi telah mencoba menerapkan blended learning, experiential learning, dan skema pembelajaran lintas aktivitas yang sesuai dengan semangat MBKM. Hal ini menunjukkan bahwa UWKS cukup responsif terhadap kebijakan transformasi pendidikan tinggi nasional.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan UI, UGM, UB, dan UNESA, terdapat sejumlah kelemahan mendasar dalam kurikulum UWKS. Salah satu kelemahan utama adalah minimnya integrasi digital politics dan political data analytics. Di tengah perkembangan politik digital dan penggunaan big data dalam dunia politik, kurikulum UWKS masih relatif konvensional. Belum terlihat adanya mata kuliah seperti Digital Democracy, AI and Politics, Political Media Analytics, ataupun Computational Politics. Kondisi ini menyebabkan lulusan berpotensi tertinggal dalam kompetensi politik digital yang saat ini sangat dibutuhkan.

Kelemahan lain adalah formulasi CPL dan profil lulusan yang masih terlalu normatif dan berbasis penguasaan konsep. Dibandingkan UI dan UGM yang sudah mengarah pada competency-based outcomes, CPL UWKS masih didominasi kata kerja seperti “memahami” dan “menguasai”. Padahal pendekatan OBE modern menuntut rumusan CPL yang lebih terukur, performatif, dan relevan dengan dunia kerja. Selain itu, profil lulusan UWKS juga masih relatif sempit karena belum mengakomodasi profesi-profesi baru di bidang ilmu politik

seperti policy analyst, political consultant, digital political strategist, ataupun governance analyst.

Dalam aspek research ecosystem, UWKS juga masih tertinggal dibanding UI, UGM, dan UB. Ketiga universitas tersebut telah memiliki kultur penelitian yang lebih kuat, laboratorium politik, pusat kajian kebijakan, hingga jaringan publikasi akademik yang relatif mapan. Sementara di UWKS, penelitian masih lebih bersifat dasar dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem riset dan inovasi politik modern.

Meski demikian, posisi UWKS sebenarnya memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Di tengah kecenderungan banyak kampus yang berlomba menjadi pusat analytical political science atau governance studies, UWKS justru dapat mengambil niche sebagai pusat kajian politik demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Identitas ini sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia yang masih menghadapi berbagai persoalan demokrasi lokal, ketimpangan sosial, partisipasi masyarakat, dan penguatan civil society.

Dalam konteks OBE dan “kampus berdampak”, posisi tersebut justru dapat menjadi keunggulan kompetitif apabila dikembangkan secara sistematis. UWKS dapat memadukan kekuatan existing-nya pada demokrasi lokal dan civil society dengan kompetensi baru seperti digital politics, political analytics, dan sociopolitical entrepreneurship. Dengan demikian, UWKS tidak perlu meniru UI atau UGM secara penuh, tetapi cukup mengadopsi beberapa elemen penting seperti penguatan analytical skill, digitalisasi, policy studies, dan research-based learning.

Secara keseluruhan, perbandingan dengan UI, UGM, UB, dan UNESA menunjukkan bahwa kurikulum ilmu politik di Indonesia sedang bergerak menuju paradigma baru yang lebih adaptif, berbasis kompetensi, digital-oriented, dan employability-oriented. UI unggul dalam analytical political science dan policy studies, UGM kuat dalam interdisciplinary governance dan problem solving, UB menonjol dalam political research dan methodological training, sedangkan UNESA berkembang dalam komunikasi politik digital dan adaptive learning. Di sisi lain, UWKS memiliki kekuatan khas pada demokrasi lokal, politik elektoral, dan pemberdayaan masyarakat.

Tantangan utama UWKS ke depan adalah bagaimana memodernisasi kurikulum tanpa kehilangan identitas sosial-politiknya. Transformasi tersebut dapat dilakukan melalui reformulasi profil lulusan berbasis profesi, penguatan CPL berbasis OBE, integrasi mata kuliah digital politics dan data analytics, pengembangan ekosistem riset politik, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah, NGO, media, dan sektor industri politik digital. Jika transformasi tersebut dilakukan secara konsisten, maka UWKS memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat kajian dan praktik demokrasi lokal serta pemberdayaan masyarakat yang modern, adaptif, dan berdampak di tingkat nasional.

Tabel 2. Perbandingan Ilmu Politik UWKS dengan Universitas dengan Prodi Sejenis

Universitas	Karakter Utama Kurikulum	Orientasi Keilmuan	Kekuatan Utama	Pendekatan Pembelajaran	Penguatan Digitalisasi	Orientasi Dunia Kerja	Kelemahan / Tantangan	Posisi Strategis
Universitas Indonesia	Analytical Political Science	Ilmu politik sebagai disiplin analitis dan riset	Sangat kuat pada political analysis, policy studies, governance, metodologi penelitian, dan academic reasoning	Research-based learning, analytical reasoning, evidence-based policy	Tinggi — mulai mengintegrasikan digital democracy, media politics, governance innovation	Policy analyst, peneliti, akademisi, governance specialist, konsultan kebijakan	Cenderung akademik dan teoritis; membutuhkan penguatan praktik lapangan	Center of Political Science Analysis
Universitas Gadjah Mada	Interdisciplinary Governance	Integrasi ilmu politik dengan governance, pembangunan, demokrasi, dan kebijakan	Kuat pada problem solving, governance studies, policy innovation, dan kajian multidisipliner	Problem-based learning, contextual learning, interdisciplinary approach	Tinggi — governance innovation, digital democracy, policy innovation	Governance specialist, policy expert, democracy practitioner, development analyst	Tantangan menjaga keseimbangan antara teori dan praktik	Center of Governance and Democratic Problem Solving
Universitas Brawijaya	Political Research and Methodology	Penguatan metodologi dan penelitian politik	Sangat kuat pada metodologi penelitian, statistik politik, analytical politics, riset empiris	Research-oriented learning dan competency-based learning	Sedang–tinggi — mulai mengembangkan data politics dan analytical skill	Peneliti politik, analis kebijakan, akademisi, data researcher	Kurang memiliki diferensiasi sosial-politik khas dibanding kampus lain	Center of Political Research and Analytical Training
Universitas Negeri Surabaya	Applied and Adaptive Politics	Politik terapan dan komunikasi politik	Kuat pada komunikasi politik digital, adaptive learning, dan keterampilan praktis	MBKM-oriented learning, project-based learning, applied learning	Sedang–tinggi — political communication, media politics, branding politik	Media strategist, political communicator, public communication specialist	Perlu penguatan analytical political science dan riset mendalam	Center of Applied Political Communication
Universitas Wijaya Kusuma	Democratic Grassroots Politics	Politik praksis, demokrasi lokal, dan	Sangat kuat pada civil society, politik	Experiential learning, blended	Rendah — belum terintegrasi kuat dengan digital	NGO, partai politik, legislatif,	Minim digital politics, CPL belum	Potential Center of Applied

Surabaya		pemberdayaan masyarakat	elektoral, demokrasi lokal, advokasi sosial masyarakat	learning, praktik lapangan, MBKM administratif	politics dan data analytics	KPU/Bawaslu, pemberdayaan masyarakat	sepenuhnya OBE, riset dan data analytics masih tradisional	Democratic Politics and Community Governance
----------	--	-------------------------	--	--	-----------------------------	--------------------------------------	--	--

Tabel 3. Perbandingan Implementasi OBE dan MBKM di Prodi Sejenis

Aspek	UWKS	UI	UGM	UB	UNESA
Karakter utama	Advokasi & pemilu	Analytical politics	Interdisciplinary governance	Political research	Applied politics
Pendekatan	Praktis-sosial	Akademik-analitis	Problem solving	Research based	Adaptif
Politik digital	Rendah	Sedang–tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Political data	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Civil society	Sangat kuat	Kuat	Kuat	Sedang	Sedang
Policy studies	Sedang	Sangat kuat	Sangat kuat	Kuat	Sedang
Electoral studies	Sangat kuat	Sedang	Sedang	Sedang	Kuat
Research methodology	Sedang	Sangat kuat	Sangat kuat	Sangat kuat	Kuat
Outcome employability	Sedang	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi
Digital governance	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

2.2 Tracer Study

2.2.1. Kesesuaian Bidang Ilmu dengan Dunia Kerja

Hasil tracer study menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan Program Studi Ilmu Politik telah bekerja pada bidang yang memiliki keterkaitan dengan kompetensi yang diperoleh selama perkuliahan. Pada tracer study tahun 2021–2022, sebanyak 86% lulusan menyatakan pekerjaan yang dijalani sesuai dengan bidang ilmu, sedangkan 14% bekerja pada bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan ilmu politik. Selain itu, jenis pekerjaan lulusan cukup beragam, meliputi aparatur sipil negara (PNS), staf pemerintahan, perbankan, wartawan, wiraswasta, pengurus partai politik, hingga sektor swasta.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi lulusan tidak hanya dibutuhkan pada sektor pemerintahan, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk bekerja pada berbagai sektor yang membutuhkan kemampuan analisis, komunikasi, kepemimpinan, dan tata kelola organisasi. Namun demikian, masih terdapat lulusan yang bekerja di luar bidang ilmu politik sehingga kurikulum perlu memperkuat kompetensi yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Penguatan kompetensi analisis kebijakan, tata kelola pemerintahan, politik lokal, komunikasi politik digital, serta pengalaman praktik melalui magang menjadi langkah penting untuk meningkatkan relevansi lulusan terhadap dunia kerja.

2.2.2. Link and Match Keterampilan (Kompetensi yang Dikuasai vs. Kebutuhan Dunia Kerja)

Data tracer study menunjukkan bahwa lulusan memberikan penilaian yang sangat baik terhadap kompetensi dasar yang diperoleh selama kuliah. Aspek etika, keahlian bidang ilmu, penggunaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri memperoleh penilaian baik hingga sangat baik dari hampir seluruh responden pada tiga periode tracer study. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah berhasil membentuk kompetensi akademik dan soft skills yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Di sisi lain, hasil tracer study juga memperlihatkan bahwa kemampuan bahasa Inggris masih menjadi aspek yang relatif perlu ditingkatkan dibandingkan kompetensi lainnya. Pada laporan 2021–2022 masih terdapat lulusan yang menilai kemampuan bahasa Inggris berada pada kategori cukup. Selain itu, bagian tindak lanjut tracer study secara konsisten merekomendasikan peningkatan pelatihan public speaking, penguatan kemampuan bahasa asing, career preparation, psikotes, serta peningkatan kerja sama dengan mitra melalui program magang, pertukaran mahasiswa, dan keterlibatan praktisi dalam pembelajaran.

Temuan tersebut menjadi dasar bahwa kurikulum baru perlu memperkuat kompetensi abad ke-21, terutama kemampuan komunikasi profesional, literasi digital, analisis data politik, bahasa Inggris akademik, serta pengalaman belajar berbasis proyek (project-based learning) dan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) agar lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

2.2.3. Masa Tunggu Kerja

Tracer study menunjukkan bahwa lulusan Program Studi Ilmu Politik memiliki masa tunggu kerja yang relatif singkat. Pada tahun 2020–2021 sebanyak 67% lulusan memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah lulus. Kondisi tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021–2022 menjadi 86%, sedangkan pada tahun 2022–2023 sebesar 78% lulusan telah memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah lulus.

Data tersebut menunjukkan bahwa lulusan memiliki daya saing yang cukup baik dalam memasuki dunia kerja. Meskipun demikian, variasi jenis pekerjaan yang cukup luas mengindikasikan bahwa kompetensi lulusan perlu semakin diarahkan pada kebutuhan profesi yang lebih spesifik sesuai dengan profil lulusan Program Studi Ilmu Politik, yaitu Political and Policy Analyst, Democratic Governance and Electoral Specialist, dan Community Empowerment and Sociopolitical Innovator. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya berorientasi pada kecepatan memperoleh pekerjaan, tetapi juga pada kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi lulusan.

2.2.4. Evaluasi Metode Pembelajaran sebagai Dasar Perumusan Kurikulum Adaptif

Hasil tracer study memberikan masukan bahwa pengembangan kurikulum tidak cukup berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga harus memperkuat pengalaman praktik, keterampilan profesional, dan kesiapan kerja lulusan. Program studi secara konsisten merekomendasikan peningkatan pelatihan kompetensi, penguatan kemampuan bahasa Inggris, peningkatan keterlibatan praktisi dalam pembelajaran, pengembangan program magang, perluasan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta evaluasi mata kuliah yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kurikulum OBE Program Studi Ilmu Politik UWKS perlu mengedepankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning) dengan memadukan case method, project-based learning, problem-based learning, magang, penelitian, dan pembelajaran kolaboratif bersama mitra eksternal. Selain itu, penguatan kompetensi digital, analisis data politik, komunikasi politik, tata kelola pemerintahan, politik lokal, dan kebijakan publik perlu diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam struktur kurikulum. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cepat terserap di dunia kerja, tetapi juga memiliki kompetensi profesional yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, lembaga demokrasi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan perkembangan transformasi digital di bidang politik.

III. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Tahun 2020 pada Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) merupakan salah satu bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap kebijakan transformasi pendidikan tinggi nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada periode tersebut, mayoritas program studi di Indonesia sedang berada pada fase transisi dari kurikulum berbasis isi (*content-based curriculum*) menuju kurikulum berbasis capaian pembelajaran dan fleksibilitas pembelajaran mahasiswa. Dalam konteks tersebut, Prodi Ilmu Politik UWKS dapat dikatakan cukup progresif karena telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip MBKM ke dalam struktur kurikulum, terutama dalam aspek fleksibilitas pembelajaran, penguatan *experiential learning*, serta integrasi pembelajaran berbasis praktik lapangan.

Secara filosofis, implementasi kurikulum MBKM 2020 Ilmu Politik UWKS menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan tinggi tidak lagi dapat bertumpu pada model pembelajaran konvensional yang berfokus pada transfer pengetahuan semata. Kurikulum mulai diarahkan pada pengembangan kompetensi mahasiswa melalui pembelajaran kontekstual, pembelajaran lintas disiplin, serta penguatan keterampilan abad ke-21 seperti *critical thinking*, *communication*, *collaboration*, dan *creativity*. Dalam dokumen kurikulum terlihat bahwa program studi telah mencoba menyesuaikan diri dengan paradigma pembelajaran modern melalui penerapan *blended learning*, penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, serta pengembangan mata kuliah yang mendukung praktik politik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual Prodi Ilmu Politik UWKS memahami arah perubahan pendidikan tinggi nasional pada awal implementasi MBKM.

Namun demikian, apabila dievaluasi lebih mendalam menggunakan perspektif *Outcome Based Education* (OBE) dan paradigma pendidikan tinggi mutakhir, implementasi kurikulum MBKM 2020 Ilmu Politik UWKS masih berada pada tahap transisional. Artinya, kurikulum sudah mengadopsi struktur MBKM secara administratif, tetapi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kurikulum OBE strategis yang berbasis *outcome* profesi, *employability*, digitalisasi, dan kesiapan industri. Dalam praktiknya, MBKM di UWKS masih lebih banyak dipahami sebagai fleksibilitas pengambilan mata kuliah dan konversi kegiatan akademik ke dalam satuan kredit semester, belum sebagai ekosistem pembelajaran yang secara sistematis membangun kompetensi profesional mahasiswa sesuai kebutuhan dunia kerja masa depan.

Salah satu kekuatan utama implementasi kurikulum MBKM Ilmu Politik UWKS terletak pada identitas keilmuan dan orientasi sosial-politiknya. Berbeda dengan beberapa program studi ilmu politik lain yang cenderung teoritis dan akademik, kurikulum UWKS memiliki karakter kuat pada isu demokrasi lokal, kepartaian, sistem pemilu, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi sosial. Karakter tersebut terlihat dari sejumlah mata kuliah seperti Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia, Politik Pemberdayaan Masyarakat, Gerakan Sosial Politik Indonesia, Politik Pemerintahan Desa, Perspektif Gender dalam Politik, serta Internship Legislatif. Mata kuliah tersebut menunjukkan bahwa kurikulum UWKS berupaya mendekatkan mahasiswa pada realitas politik praktis dan dinamika masyarakat sipil. Dalam konteks tertentu, kekuatan ini menjadi *distingsi* yang cukup unik dibandingkan beberapa kampus lain yang lebih berorientasi pada kajian teoritik dan riset akademik.

Tabel 4. Analisis SWOT Implementasi Kurikulum MBKM Ilmu Politik UWKS

Strengths	Weaknesses
Kuat pada demokrasi lokal	Minim digital politics
Kuat pada civil society	CPL belum OBE penuh
Elektoral cukup kuat	Outcome profesi belum jelas
MBKM administratif cukup baik	Belum berbasis data politics

Kontekstual dengan masyarakat	Asesmen OBE belum matang
Opportunities	Threats
Politik digital berkembang	Kompetisi antar prodi makin tinggi
Kebutuhan governance specialist	Kurikulum cepat usang
Civic-tech meningkat	Dunia kerja makin skill-based
Demand analis kebijakan	AI menggantikan skill administratif

Kekuatan lain dari implementasi MBKM UWKS adalah program studi mampu memasukkan unsur praktik dan pembelajaran lapangan ke dalam struktur kurikulum. Adanya skema internship legislatif, mata kuliah berbasis MBKM, serta fleksibilitas pembelajaran lintas aktivitas menunjukkan bahwa program studi telah mencoba menerapkan prinsip experiential learning. Mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai penerima teori, tetapi juga sebagai peserta aktif yang mengalami langsung dinamika politik dan pemerintahan. Pendekatan ini cukup relevan dengan semangat MBKM yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama pembelajaran dan mendorong mereka memperoleh pengalaman di luar ruang kelas.

Di sisi lain, implementasi kurikulum MBKM Ilmu Politik UWKS juga memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang perlu diperhatikan apabila program studi ingin menyesuaikan diri dengan arah pengembangan pendidikan tinggi nasional pasca-2024. Kelemahan pertama terletak pada formulasi profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang masih cenderung normatif dan berbasis penguasaan konsep. Dalam dokumen kurikulum, sebagian besar CPL masih menggunakan kata kerja seperti “memahami”, “menguasai”, dan “mengaplikasikan konsep”. Padahal dalam pendekatan OBE modern, CPL seharusnya dirumuskan secara lebih terukur dan berbasis performa profesi, misalnya “mampu menganalisis”, “mampu merancang”, “mampu mengevaluasi”, atau “mampu mengomunikasikan”. Perubahan ini penting karena OBE menekankan keterukuran capaian pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja.

Kelemahan berikutnya adalah profil lulusan yang masih terlalu sempit dan belum sepenuhnya menjawab transformasi industri politik kontemporer. Profil lulusan UWKS saat ini masih berfokus pada manajemen pemerintahan, tata kelola partai politik dan sistem pemilu, serta advokasi sosial masyarakat. Secara substantif profil tersebut masih relevan, tetapi belum cukup adaptif terhadap perkembangan profesi baru di bidang ilmu politik. Saat ini dunia kerja lulusan ilmu politik berkembang ke arah policy analyst, governance analyst, political consultant, political communication specialist, digital campaign strategist, media analyst, hingga sociopolitical entrepreneur. Dalam konteks ini, APSIPOL tahun 2024 bahkan telah merekomendasikan profil lulusan baru berupa ilmuwan politik, praktisi politik, konsultan politik, komunikator politik, dan entrepreneur. Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional paradigma pendidikan ilmu politik mulai bergeser dari sekadar kajian akademik menuju orientasi profesi dan employability.

Aspek lain yang menjadi kelemahan utama implementasi kurikulum MBKM UWKS adalah minimnya integrasi digitalisasi politik dan data analytics ke dalam struktur kurikulum. Transformasi politik global saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, media sosial, artificial intelligence, big data, dan analisis perilaku politik berbasis data. Namun dalam kurikulum UWKS belum terlihat adanya mata kuliah seperti Politik Digital, Big Data Politik, AI dan Demokrasi, Media Analytics, Political Data Visualization, ataupun Computational Politics. Padahal kompetensi tersebut semakin dibutuhkan baik dalam dunia politik praktis maupun industri kebijakan publik. Kondisi ini menyebabkan lulusan berpotensi tertinggal dibanding lulusan dari universitas lain yang telah lebih dahulu mengintegrasikan digital politics ke dalam kurikulum mereka.

Selain digitalisasi, aspek metodologi penelitian dalam implementasi kurikulum MBKM UWKS juga masih cenderung tradisional. Program studi memang telah memiliki mata kuliah Metodologi Penelitian Politik, Pengantar Statistik Sosial, dan Survey serta Quick Count. Namun pendekatan riset

yang diajarkan masih dominan pada metode konvensional. Belum terlihat penguatan pada digital research methods, social media analytics, political forecasting, sentiment analysis, maupun data scraping. Akibatnya, kemampuan mahasiswa dalam membaca dan menganalisis fenomena politik berbasis data digital masih terbatas. Dalam era politik digital saat ini, kemampuan tersebut sebenarnya menjadi salah satu kompetensi utama lulusan ilmu politik modern.

Dalam perspektif implementasi MBKM, evaluasi lain yang penting adalah terkait hubungan antara kurikulum dan dunia kerja. Kurikulum MBKM UWKS cukup relevan untuk menghasilkan lulusan yang bekerja di sektor NGO, organisasi masyarakat sipil, partai politik, lembaga legislatif, KPU, Bawaslu, maupun pemerintahan lokal. Namun kurikulum masih kurang relevan untuk sektor-sektor baru seperti policy think tank, civic-tech startup, konsultan politik digital, public affairs, governance innovation, atau industri media politik. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi employability dalam kurikulum masih perlu diperkuat agar lulusan memiliki fleksibilitas karier yang lebih luas.

Dari sisi implementasi pembelajaran, program studi sebenarnya telah mencoba mengadopsi pendekatan student-centered learning dan blended learning. Namun implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal asesmen berbasis OBE. Hingga saat ini belum terlihat secara jelas penggunaan rubrik asesmen kompetensi, authentic assessment, project-based learning, maupun portfolio-based assessment yang menjadi inti dari OBE. Padahal keberhasilan MBKM tidak hanya ditentukan oleh fleksibilitas kurikulum, tetapi juga oleh kemampuan program studi dalam memastikan bahwa setiap pengalaman belajar mahasiswa benar-benar menghasilkan kompetensi yang terukur.

Gambar 1. Analisis SWOT



Paradigma "kampus berdampak" yang saat ini menjadi arah baru pendidikan tinggi nasional juga menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi kurikulum MBKM UWKS. Paradigma ini menuntut perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap masyarakat melalui inovasi sosial, hilirisasi pengetahuan, kolaborasi industri, dan penyelesaian masalah sosial. Dalam konteks ini, UWKS sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat

karena kurikulumnya dekat dengan isu pemberdayaan masyarakat, demokrasi lokal, dan civil society. Namun kekuatan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi ekosistem inovasi sosial-politik yang terstruktur, seperti democracy lab, policy innovation center, civic-tech incubator, ataupun political data center.

Apabila dibandingkan dengan beberapa universitas lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, maupun UNESA, implementasi kurikulum MBKM UWKS menunjukkan posisi yang cukup unik. UI dan UGM lebih unggul dalam analytical political science, riset, dan governance studies, sedangkan UWKS lebih kuat pada politik praksis, demokrasi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Keunggulan ini sebenarnya dapat menjadi diferensiasi nasional apabila dikembangkan secara konsisten. Namun untuk mencapai posisi tersebut, program studi perlu melakukan modernisasi kurikulum tanpa kehilangan identitas sosial-politiknya.

Secara keseluruhan, implementasi kurikulum MBKM 2020 Ilmu Politik UWKS dapat dinilai berhasil sebagai fondasi awal transformasi pendidikan tinggi pada era MBKM. Program studi telah menunjukkan upaya adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional melalui fleksibilitas pembelajaran, penguatan experiential learning, serta orientasi pada demokrasi lokal dan civil society. Namun implementasi tersebut masih memerlukan transformasi lanjutan agar benar-benar sesuai dengan paradigma OBE modern, kampus berdampak, digitalisasi politik, dan employability lulusan.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi strategis perlu dilakukan. Pertama, program studi perlu memperbarui profil lulusan menjadi lebih berbasis profesi dan outcome, misalnya political analyst, democratic governance specialist, digital political communicator, political researcher, dan sociopolitical entrepreneur. Kedua, CPL perlu direformulasi menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan berbasis kompetensi. Ketiga, kurikulum perlu diperkuat dengan mata kuliah baru seperti Politik Digital, AI dan Demokrasi, Political Data Analytics, Policy Brief Writing, dan Digital Campaign Strategy. Keempat, sistem asesmen pembelajaran perlu diarahkan pada authentic assessment, project-based learning, dan portfolio assessment. Kelima, program studi perlu membangun ekosistem kolaborasi dengan pemerintah, media, NGO, dan industri politik digital agar implementasi MBKM benar-benar menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan politik dan industri di masa depan.

Dengan transformasi tersebut, Prodi Ilmu Politik UWKS memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat kajian dan praktik politik demokrasi lokal serta pemberdayaan masyarakat yang modern, adaptif, dan berdampak. Identitas khas yang telah dimiliki program studi justru dapat menjadi kekuatan utama apabila dipadukan dengan pendekatan OBE, digitalisasi, dan orientasi profesi yang relevan dengan perkembangan zaman.

IV. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

Program Studi Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) telah menetapkan rumusan Tujuan Pendidikan Program Studi (Program Educational Objectives/PEO) yang selaras dengan visi keilmuan program studi serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), kebutuhan pengguna lulusan, serta keunggulan dan kekhasan program studi dibandingkan dengan program sejenis. Tujuan pendidikan ini disusun berdasarkan visi untuk menghasilkan lulusan Sarjana Ilmu Politik yang profesional dan unggul, dengan karakteristik utama yang mencakup pemahaman mendalam terhadap dinamika politik, kemampuan aplikatif di bidang politik, integritas tinggi (kompeten, akuntabel, etis, dan memiliki kontrol diri), serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

Rumusan tujuan pendidikan ini dijabarkan secara sistematis ke dalam empat misi utama program studi: (1) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berbasis riset, dan aplikatif, (2) melaksanakan penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat, (3) melaksanakan pengabdian yang berintegritas serta menjawab problematika politik di masyarakat, dan (4) menciptakan iklim kemahasiswaan yang kondusif serta kompetitif untuk pengembangan soft skills. Dari misi tersebut, PEO dirancang tidak hanya untuk menjawab tantangan akademik dan profesionalisme, tetapi juga untuk menciptakan lulusan yang adaptif, solutif, dan berkontribusi dalam dinamika sosial-politik Indonesia.

Keunikan program studi Ilmu Politik UWKS terletak pada pendekatan pembelajarannya yang integratif dan aplikatif, di mana mahasiswa tidak hanya dibekali dengan teori politik, tetapi juga diterjunkan dalam pengalaman langsung melalui magang di lembaga legislatif, simulasi pemilu, serta pelatihan resolusi konflik dan pembangunan politik. Kurikulum disusun secara dinamis dan adaptif dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pengguna lulusan, dosen, alumni, serta pakar di bidang ilmu politik. Hal ini menjadikan PEO program studi mampu mencerminkan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan politik kontemporer, baik secara nasional maupun global.

Selain itu, rumusan tujuan pendidikan ini dievaluasi secara berkala melalui forum-forum akademik, rapat evaluasi program studi, serta survei tracer study dan pengguna lulusan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi pengembangan sumber daya manusia. Dengan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan, program studi memastikan bahwa arah pengembangan keilmuan dan profesionalisme lulusan tetap relevan, kompetitif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan zaman.

Dengan demikian, Program Studi Ilmu Politik UWKS secara konsisten menerapkan rumusan tujuan pendidikan yang mencerminkan visi keilmuan, menjawab tantangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna, serta memperkuat keunggulan program studi sebagai institusi yang mencetak sarjana ilmu politik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tangguh dalam menghadapi dinamika politik praktis dan sosial kemasyarakatan.

V. BODY OF KNOWLEDGE PROGRAM STUDI

5.1 Konsep Dasar

Body of Knowledge (BoK) Program Studi S1 Ilmu Politik merupakan himpunan pengetahuan, konsep, teori, metode, nilai, dan praktik keilmuan yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. *Body of Knowledge* ini menjadi dasar dalam penyusunan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, struktur mata kuliah, serta strategi pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE).

Body of Knowledge Program Studi Ilmu Politik UWKS disusun berdasarkan perkembangan ilmu politik sebagai ilmu sosial yang mempelajari fenomena kekuasaan, negara, pemerintahan, demokrasi, kebijakan publik, hubungan negara dan masyarakat, partisipasi politik, serta dinamika politik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Selain itu, *Body of Knowledge* juga mengintegrasikan perkembangan ilmu politik kontemporer yang dipengaruhi oleh digitalisasi, transformasi tata kelola pemerintahan, inovasi sosial, dan kebutuhan dunia kerja abad ke-21. *Body of Knowledge* Program Studi Ilmu Politik UWKS dibangun di atas lima landasan utama:

1. Pertama, landasan filosofis, yaitu ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang mengkaji hakikat kekuasaan, negara, demokrasi, keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, dan kehidupan politik yang beretika. Landasan ini menjadi dasar pembentukan karakter lulusan yang memiliki integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
2. Kedua, landasan teoritis, yaitu penguasaan teori-teori politik klasik, modern, dan kontemporer yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, serta menganalisis berbagai fenomena politik. Penguasaan teori ini menjadi fondasi kemampuan berpikir kritis dan analitis yang diperlukan dalam menyusun solusi atas persoalan politik dan kebijakan publik.
3. Ketiga, landasan metodologis, yaitu kemampuan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed methods, maupun analisis digital dalam menghasilkan pengetahuan ilmiah yang berbasis bukti (evidence-based).
4. Keempat, landasan praktis, yaitu kemampuan menerapkan ilmu politik dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, demokrasi, pemilihan, komunikasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi sosial-politik.
5. Kelima, landasan inovatif, yaitu kemampuan memanfaatkan teknologi digital, data politik, artificial intelligence, media digital, dan inovasi sosial sebagai bagian dari transformasi ilmu politik modern.

Body of Knowledge Program Studi Ilmu Politik UWKS mencakup delapan bidang keilmuan utama yang saling terintegrasi.

1. Political Science Foundation

Political Science Foundation merupakan fondasi utama dalam *Body of Knowledge* Program Studi S1 Ilmu Politik UWKS yang memberikan landasan filosofis, konseptual, dan teoritis bagi seluruh proses pembelajaran. Bidang ini mengkaji hakikat politik, negara, kekuasaan, demokrasi, ideologi, etika politik, hak asasi manusia, serta perkembangan pemikiran politik klasik hingga kontemporer. Melalui penguasaan bidang ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memahami berbagai fenomena politik, sekaligus mampu menggunakan teori-teori politik sebagai dasar analisis terhadap dinamika sosial-politik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Sebagai fondasi keilmuan, bidang ini menjadi dasar bagi seluruh mata kuliah lanjutan dan mendukung terbentuknya kompetensi akademik yang kuat pada seluruh profil lulusan.

2. Political Research and Policy Analysis

Political Research and Policy Analysis berfokus pada pengembangan kemampuan penelitian, analisis data, serta penyusunan rekomendasi kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy). Bidang ini mencakup metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, analisis statistik politik, survei, polling, analisis data sosial-politik, serta teknik penyusunan policy brief. Penguasaan bidang ini memungkinkan lulusan menghasilkan kajian ilmiah yang berkualitas, melakukan evaluasi kebijakan

secara sistematis, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Bidang ini menjadi penguatan utama bagi profil lulusan Political and Policy Analyst.

3. Local Politics, Democratic Governance and Electoral Studies (Center of Excellence)

Local Politics, Democratic Governance and Electoral Studies merupakan bidang unggulan sekaligus identitas akademik Program Studi Ilmu Politik UWKS. Sebagai Center of Excellence, bidang ini mengkaji dinamika politik lokal, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, desentralisasi, demokrasi lokal, sistem pemilihan, kepartaian, perilaku pemilih, serta tata kelola demokrasi. Kajian ini bertujuan membentuk lulusan yang mampu memahami hubungan antara negara dan masyarakat di tingkat lokal, mengevaluasi kualitas demokrasi daerah, serta merancang tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Bidang ini menjadi pilar utama dalam membentuk lulusan Democratic Governance and Electoral Specialist sekaligus menjadi pembeda Program Studi Ilmu Politik UWKS dibandingkan program studi sejenis.

4. Public Policy and Governance

Public Policy and Governance mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami proses perumusan, implementasi, evaluasi, dan inovasi kebijakan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ruang lingkup kajian meliputi kebijakan publik, analisis kebijakan, tata kelola pemerintahan, collaborative governance, e-government, pelayanan publik, serta inovasi sektor publik. Melalui bidang ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan publik, menyusun alternatif kebijakan, mengevaluasi implementasi kebijakan, serta mengembangkan model tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bidang ini memperkuat kompetensi lulusan sebagai analis kebijakan sekaligus profesional di bidang pemerintahan.

5. Digital Politics, Political Communication and Data Analytics

Perkembangan teknologi digital telah mengubah praktik politik, komunikasi publik, serta proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, bidang Digital Politics, Political Communication and Data Analytics dikembangkan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami komunikasi politik, media digital, political branding, public relations, kampanye politik, media sosial, analisis data politik, big data, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) dalam analisis politik. Bidang ini diarahkan agar lulusan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara etis, kritis, dan strategis dalam mendukung komunikasi politik, pendidikan politik, tata kelola pemerintahan digital, serta penguatan partisipasi masyarakat di era transformasi digital.

6. Community Empowerment and Democratic Innovation

Community Empowerment and Democratic Innovation merupakan bidang yang mengintegrasikan ilmu politik dengan pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi partisipatif. Kajian dalam bidang ini mencakup pembangunan politik, pemberdayaan masyarakat, civil society, gerakan sosial, advokasi kebijakan, resolusi konflik, pembangunan berkelanjutan (SDGs), civic-tech, inovasi sosial, serta tata kelola partisipatif. Melalui bidang ini, mahasiswa diarahkan untuk mampu merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil, mendorong inovasi demokrasi, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial-politik. Bidang ini menjadi penguatan utama bagi profil lulusan Community Empowerment and Sociopolitical Innovator.

7. Comparative Politics, Global Governance and Geopolitics

Comparative Politics, Global Governance and Geopolitics memberikan perspektif komparatif dan global terhadap perkembangan politik kontemporer. Bidang ini meliputi teori dan metode perbandingan politik, politik global, geopolitik, diplomasi, organisasi internasional, serta tata kelola global (global governance). Melalui kajian ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk membandingkan sistem politik berbagai negara, memahami dinamika hubungan internasional, serta menganalisis pengaruh perubahan politik global terhadap kebijakan nasional dan politik lokal. Perspektif global tersebut menjadi pelengkap bagi penguatan kompetensi lulusan sehingga mampu merespons tantangan politik yang semakin kompleks pada tingkat nasional maupun internasional.

Ketujuh bidang keilmuan dalam Body of Knowledge tersebut saling terintegrasi dan dirancang untuk mendukung pencapaian tiga profil lulusan Program Studi S1 Ilmu Politik UWKS. Political

Science Foundation menjadi fondasi akademik yang menopang seluruh proses pembelajaran. Political Research and Policy Analysis memperkuat kompetensi lulusan sebagai Political and Policy Analyst, sedangkan Local Politics, Democratic Governance and Electoral Studies bersama Public Policy and Governance menjadi inti pengembangan kompetensi Democratic Governance and Electoral Specialist. Selanjutnya, Community Empowerment and Sociopolitical Innovation menjadi pilar utama dalam membentuk Community Empowerment and Sociopolitical Innovator, dengan dukungan Political Communication and Digital Politics serta Comparative, Global Politics and International Governance yang memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perkembangan politik digital dan dinamika global. Integrasi ketujuh bidang tersebut menghasilkan kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar APSIPOL, KKNi Level 6, dan Outcome Based Education (OBE), tetapi juga mempertegas identitas Program Studi Ilmu Politik UWKS sebagai pusat pengembangan ilmu politik yang berorientasi pada politik lokal, tata kelola demokrasi, analisis kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

5.2 Integrasi Body of Knowledge dengan Profil Lulusan

Body of Knowledge tersebut dikembangkan untuk mendukung pencapaian tiga profil lulusan Program Studi Ilmu Politik UWKS.

Bidang Fundamental Political Science, Political Research and Policy Analysis, serta Governance and Public Policy menjadi landasan utama bagi profil lulusan Political and Policy Analyst. Melalui bidang-bidang tersebut, mahasiswa dibekali kemampuan menganalisis fenomena politik, merumuskan rekomendasi kebijakan, serta melakukan penelitian berbasis data.

Bidang Democracy, Electoral Politics and Political Institutions, Digital Politics and Political Communication, serta sebagian kajian Governance and Public Policy mendukung profil lulusan Democratic Governance and Electoral Specialist. Kompetensi yang dibangun meliputi pengelolaan demokrasi, sistem pemilihan, komunikasi politik digital, tata kelola pemerintahan, serta penguatan institusi politik.

Sementara itu, bidang Community Empowerment and Civil Society, Leadership, Innovation and Political Entrepreneurship, serta Global Politics and Comparative Politics mendukung profil lulusan Community Empowerment and Sociopolitical Innovator. Mahasiswa diarahkan untuk mampu merancang program pemberdayaan masyarakat, mengembangkan inovasi sosial, memperkuat partisipasi publik, serta membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

5.3 Arah Pengembangan Keilmuan

Body of Knowledge Program Studi Ilmu Politik UWKS menempatkan ilmu politik tidak hanya sebagai disiplin akademik yang menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga sebagai ilmu terapan (applied political science) yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan demokrasi, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan masyarakat.

Melalui integrasi antara penguasaan teori, kemampuan analitis, literasi digital, metode penelitian, pengalaman praktik, serta inovasi sosial, kurikulum OBE diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan sosial sesuai kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan pembangunan nasional. Dengan demikian, *Body of Knowledge* ini menjadi fondasi strategis bagi terwujudnya visi Program Studi Ilmu Politik UWKS sebagai program studi yang unggul dalam analisis politik dan kebijakan publik, tata kelola demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi dan teknologi, selaras dengan prinsip Outcome Based Education, KKNi Level 6, dan paradigma Kampus Berdampak.

VI. PERSYARATAN LULUS

1. Jumlah SKS minimal : 144 SKS
2. IPK minimal : 2,75
3. Tidak terdapat nilai **D** dan **E**
4. Prasyarat nilai mata kuliah tertentu
 - Dasar-Dasar Ilmu Politik : B
 - Sistem Politik Indonesia : B
 - Pemikiran Politik : B
 - Kebijakan Publik : B
 - Pembangunan Politik : B
 - Teori dan Metode Perbandingan Politik : B
 - Metode Penelitian Kualitatif I.Politik : B
 - Metode Penelitian Kuantitatif I.Politik : B
 - Teori Politik : B
 - Etika Politik : B

VII. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

7.1. Profil Program Studi

Berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya, kebutuhan dunia kerja, prinsip Outcome Based Education (OBE), KKNI Level 6, serta arah pengembangan APSIPOL, Program Studi S1 Ilmu Politik UWKS menetapkan tiga profil lulusan utama yang merepresentasikan distingsi program studi, kebutuhan profesi abad ke-21, serta paradigma kampus berdampak.

Tabel 5. Profil Lulusan

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil	Ruang Lingkup Profesi	Kompetensi Utama
1	Ilmuan - Political and Policy Analyst	Lulusan mampu menganalisis fenomena politik, kebijakan publik, demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan dinamika sosial-politik menggunakan pendekatan ilmu politik, metode penelitian, dan analisis berbasis data secara kritis, sistematis, dan profesional.	• Analis kebijakan • Governance analyst • Policy researcher • Legislative assistant • Tenaga ahli politik • Political consultant • Think tank researcher	• Analisis politik • Analisis kebijakan publik • Political reasoning • Political data analysis • Policy brief writing • Academic and policy communication
2	Konsultan - Democratic Governance and Electoral Specialist	Lulusan mampu mengelola, mengevaluasi, dan mengembangkan tata kelola demokrasi, sistem pemilihan, kepartaian, pemerintahan daerah, serta partisipasi politik masyarakat secara profesional, etis, dan berbasis teknologi digital.	• Penyelenggara pemilu • Konsultan demokrasi • Political governance officer • Staf pemerintahan • Tenaga ahli legislatif • Democracy program officer • Public affairs officer	• Tata kelola demokrasi • Kepemiluan dan kepartaian • Demokrasi lokal • Political governance • Komunikasi politik digital • Political media strategy
3	Praktisi - Community Empowerment and Sociopolitical Innovator	Lulusan mampu merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, advokasi sosial-politik, penguatan civil society, serta inovasi sosial berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.	• NGO officer • Community organizer • Social advocacy specialist • Democracy activist • Civic-tech initiator • Social entrepreneur • Program officer organisasi masyarakat sipil	• Community development • Advokasi sosial-politik • Pemberdayaan masyarakat • Social innovation • Civic entrepreneurship • Participatory governance

Tabel 6. Perbandingan Profil Lulusan Program Studi S1 Ilmu Politik UWKS

Aspek	Profil Lulusan Lama (Kurikulum MBKM 2020)	Evaluasi	Profil Lulusan Baru (Rekomendasi OBE-KKNI)	Orientasi Baru
Profil 1	Manajemen Pemerintahan dan Tata Kelola Birokrasi	Masih bersifat umum dan birokratis; belum menunjukkan outcome	Ilmuan - Political and Policy Analyst	Berbasis analytical politics, policy studies, governance

		profesi secara spesifik		analysis, dan political data
Profil 2	Tata Kelola Partai Politik dan Sistem Kepemiluan	Sudah menjadi kekuatan khas UWKS tetapi masih konvensional	Konsultan - Democratic Governance and Electoral Specialist	Berbasis democratic governance, electoral politics, komunikasi politik digital, dan tata kelola demokrasi
Profil 3	Advokasi Sosial Masyarakat	Menjadi kekuatan civil society dan pemberdayaan masyarakat	Praktisi - Community Empowerment and Sociopolitical Innovator	Berbasis pemberdayaan masyarakat, social innovation, civic entrepreneurship, dan participatory governance

Pada kurikulum lama berbasis MBKM 2020, profil lulusan Program Studi Ilmu Politik UWKS masih disusun dengan pendekatan berbasis bidang kajian dan ruang lingkup kerja tradisional ilmu politik. Profil seperti manajemen pemerintahan dan tata kelola birokrasi, tata kelola partai politik dan sistem pemilihan, serta advokasi sosial masyarakat menunjukkan bahwa orientasi utama kurikulum masih berada pada penguasaan substansi politik konvensional dan kebutuhan institusi politik formal. Pendekatan tersebut sebenarnya masih relevan dalam konteks ilmu politik klasik, terutama karena program studi memiliki kekuatan pada isu demokrasi lokal, civil society, dan politik elektoral. Akan tetapi, perkembangan dunia kerja, transformasi digital, dan perubahan paradigma pendidikan tinggi menyebabkan profil lulusan lama menjadi kurang adaptif terhadap kebutuhan profesi abad ke-21.

Evaluasi terhadap profil lulusan lama menunjukkan bahwa sebagian besar profil masih bersifat umum, birokratis, dan belum secara spesifik menunjukkan outcome profesi yang terukur. Misalnya, profil “manajemen pemerintahan dan tata kelola birokrasi” lebih menggambarkan bidang kajian daripada kompetensi profesional lulusan. Dalam pendekatan OBE, profil lulusan seharusnya menunjukkan kemampuan nyata yang dapat dilakukan oleh lulusan setelah menyelesaikan pendidikan. Karena itu, rekomendasi kurikulum baru mengubah paradigma tersebut menjadi profil yang lebih berbasis kompetensi profesi, employability, dan kebutuhan dunia kerja modern.

Perubahan pertama terlihat pada transformasi profil lulusan menjadi “Political and Policy Analyst”. Profil ini menggantikan pendekatan lama yang terlalu umum menjadi lebih spesifik pada kemampuan analisis politik, analisis kebijakan, political reasoning, dan pengolahan data politik. Perubahan ini sangat penting karena dunia kerja ilmu politik saat ini semakin membutuhkan lulusan yang mampu membaca persoalan sosial-politik secara analitis dan berbasis data, bukan sekadar memahami teori politik. Dengan profil baru tersebut, lulusan diarahkan memiliki kemampuan sebagai policy analyst, governance analyst, legislative assistant, maupun researcher yang relevan dengan perkembangan sektor pemerintahan, think tank, lembaga kebijakan, dan organisasi riset.

Transformasi berikutnya terlihat pada perubahan profil “tata kelola partai politik dan sistem pemilihan” menjadi “Democratic Governance and Electoral Specialist”. Secara substantif, UWKS tetap mempertahankan identitas kuatnya pada demokrasi, pemilihan, dan tata kelola politik. Namun dalam profil baru, orientasi tersebut dimodernisasi dengan memasukkan unsur governance, political communication, dan teknologi digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa politik elektoral tidak lagi dipahami secara administratif semata, tetapi sebagai bagian dari democratic governance modern yang membutuhkan kemampuan komunikasi politik digital, media strategy, dan pengelolaan partisipasi publik berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, profil “advokasi sosial masyarakat” direformulasi menjadi “Community Empowerment and Sociopolitical Innovator”. Perubahan ini sangat penting karena menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar aktivitas advokasi menuju pengembangan inovasi sosial-politik berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam profil baru, lulusan tidak hanya diposisikan sebagai aktivis sosial, tetapi juga sebagai social innovator, civic-tech initiator, dan sociopolitical entrepreneur yang mampu menciptakan solusi sosial-politik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kekuatan khas UWKS pada civil society dan demokrasi lokal tetap dipertahankan, tetapi

diperluas agar lebih relevan dengan paradigma “kampus berdampak” dan tantangan sosial kontemporer.

7.2. Capaian Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun berdasarkan empat unsur utama SN-Dikti: 1. Sikap 2. Pengetahuan 3. Keterampilan Umum 4. Keterampilan Khusus serta diselaraskan dengan KKNI Level 6 dan prinsip Outcome Based Education (OBE). CPL program sarjana ilmu politik antara lain:

Tabel 7. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Politik

No.	Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1	CPL-1	Mampu menunjukkan sikap profesional, berintegritas, menjunjung tinggi nilai agama, etika akademik, nilai-nilai Kewijayakusumaan, demokrasi, hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, serta semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2	CPL-2	Mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan konsep, teori, serta pendekatan ilmu politik untuk memahami fenomena politik, demokrasi, pemerintahan, kebijakan publik, hubungan negara dan masyarakat, serta dinamika politik lokal, nasional, dan global secara kritis, komprehensif, dan berwawasan global.
3	CPL-3	Mampu menerapkan metode penelitian ilmu politik, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan analisis data dalam menghasilkan kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, dan solusi berbasis bukti (evidence-based policy) yang bermanfaat bagi masyarakat.
4	CPL-4	Mampu menganalisis, merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, demokrasi, pemilihan, dan kepartaian secara profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat.
5	CPL-5	Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat, penguatan civil society, advokasi sosial-politik, serta pembangunan partisipatif yang mendukung demokrasi, pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
6	CPL-6	Mampu memanfaatkan teknologi digital, komunikasi politik, media sosial, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence), dan inovasi sosial secara etis, adaptif, dan bertanggung jawab dalam analisis politik, tata kelola pemerintahan, pendidikan politik, serta penguatan partisipasi masyarakat di era transformasi digital.
7	CPL-7	Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisiplin, menunjukkan kepemimpinan, beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun jejaring kerja sama nasional dan internasional untuk mendukung profesionalisme di bidang politik, pemerintahan, dan organisasi masyarakat.
8	CPL-8	Mampu mengembangkan inovasi serta menghasilkan solusi kreatif terhadap berbagai persoalan politik, pemerintahan, demokrasi, dan pembangunan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, berbasis riset, berorientasi pada kemajuan bangsa, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Perubahan tidak hanya berkaitan dengan pergantian istilah atau struktur administratif kurikulum, tetapi mencerminkan transformasi cara pandang program studi terhadap tujuan pendidikan tinggi, kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu politik kontemporer, serta implementasi Outcome Based Education (OBE) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6.

Perubahan profil lulusan tersebut kemudian diikuti dengan transformasi capaian pembelajaran lulusan (CPL). Pada kurikulum lama, CPL masih didominasi paradigma content-based curriculum yang menekankan penguasaan konsep dan teori. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kerja operasional seperti “memahami”, “menguasai”, dan “mengaplikasikan”. Dalam perspektif OBE, rumusan seperti itu dianggap kurang terukur karena tidak menunjukkan performa kompetensi yang jelas. Mahasiswa memang dapat memahami teori politik, tetapi belum tentu mampu menggunakan teori tersebut untuk menyelesaikan persoalan nyata.

Karena itu, CPL baru disusun menggunakan pendekatan outcome-based yang lebih performatif dan measurable. Kata kerja operasional diubah menjadi “menganalisis”, “merancang”, “mengelola”, “mengevaluasi”, dan “mengembangkan”. Perubahan ini mencerminkan transformasi orientasi kurikulum dari sekadar penguasaan pengetahuan menuju pembentukan kompetensi profesional. Dengan CPL baru, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami demokrasi atau kebijakan publik, tetapi juga mampu melakukan analisis politik, menyusun rekomendasi kebijakan, mengelola komunikasi politik, melakukan penelitian berbasis data, serta mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu perubahan paling signifikan terlihat pada penguatan analytical skill dan policy analysis. Pada kurikulum lama, kemampuan analitis mahasiswa masih belum menjadi fokus utama pembelajaran. Pendekatan pembelajaran lebih banyak menekankan penguasaan teori politik secara normatif. Dalam rekomendasi kurikulum baru, analytical politics menjadi salah satu kompetensi inti. Mahasiswa diarahkan memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan berbasis data dalam membaca fenomena politik. Penguatan analytical skill ini sangat penting agar lulusan mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain seperti UI, UGM, maupun UB yang telah lebih dahulu mengembangkan analytical political science dan policy studies.

Selain analytical skill, perubahan besar juga terlihat pada integrasi digital competence dalam CPL baru. Pada kurikulum lama, aspek digitalisasi hampir belum terlihat secara signifikan. Digitalisasi lebih dipahami sebagai penggunaan teknologi pembelajaran, bukan pengembangan kompetensi politik digital. Padahal transformasi politik global saat ini sangat dipengaruhi oleh media sosial, big data, artificial intelligence, dan digital communication. Oleh karena itu, CPL baru mulai mengintegrasikan kemampuan political media strategy, digital literacy, political data analysis, survey politics, dan penggunaan teknologi digital dalam pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Integrasi digital competence ini menjadi sangat penting karena kebutuhan dunia kerja ilmu politik saat ini telah berubah secara drastis. Lulusan ilmu politik tidak hanya bekerja di pemerintahan atau partai politik, tetapi juga dibutuhkan dalam sektor media digital, konsultan politik, public affairs, polling institute, social media strategy, hingga civic-tech startup. Dengan memasukkan unsur politik digital dan data politics ke dalam CPL, maka kurikulum baru menjadi lebih relevan dengan kebutuhan profesi masa depan.

Transformasi lain yang cukup penting adalah penguatan research competence dan political data analysis. Pada kurikulum lama, metodologi penelitian masih diajarkan secara tradisional dan belum terintegrasi dengan analisis data digital. Dalam rekomendasi CPL baru, mahasiswa diarahkan mampu melakukan penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun digital, termasuk analisis survey politik, polling, dan visualisasi data sosial-politik. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum mulai bergerak menuju political science modern yang berbasis evidence dan data-driven analysis.

Di sisi lain, kekuatan khas UWKS pada community empowerment tetap dipertahankan bahkan diperkuat dalam kurikulum baru. Jika pada kurikulum lama pemberdayaan masyarakat lebih dipahami sebagai aktivitas sosial, maka dalam CPL baru konsep tersebut dikembangkan menjadi participatory governance, social innovation, dan civic entrepreneurship. Artinya, mahasiswa tidak hanya belajar melakukan advokasi sosial, tetapi juga mampu merancang solusi inovatif berbasis masyarakat dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan demokrasi lokal.

Secara keseluruhan, transformasi profil lulusan dan CPL ini menunjukkan perubahan paradigma kurikulum dari “MBKM administratif” menuju “OBE strategis”. Pada kurikulum lama, MBKM lebih banyak dipahami sebagai fleksibilitas pengambilan mata kuliah dan konversi SKS. Sedangkan dalam rekomendasi kurikulum baru, MBKM diarahkan menjadi instrumen pembentukan kompetensi profesi melalui project-based learning, experiential learning, dan democratic problem solving.

Transformasi tersebut juga memperjelas positioning Program Studi Ilmu Politik UWKS. Jika sebelumnya program studi masih dipandang sebagai program studi ilmu politik umum dengan orientasi konvensional, maka melalui profil lulusan dan CPL baru, UWKS diarahkan menjadi program studi berbasis “Applied Political Science for Democratic Governance and Community Empowerment”. Positioning ini sangat strategis karena tetap mempertahankan identitas khas UWKS pada demokrasi lokal dan civil society, namun sekaligus mengintegrasikan analytical politics, digital governance, dan sociopolitical innovation yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja abad ke-21.

Dengan demikian, perubahan profil lulusan dan CPL bukan sekadar revisi administratif kurikulum, melainkan bagian dari transformasi besar pendidikan ilmu politik di UWKS agar lebih adaptif, profesional, berbasis outcome, serta mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami politik, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan demokrasi dan masyarakat secara nyata, inovatif, dan berdampak.

7.3. Deskripsi Standar KKNi Dalam Prodi

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun berdasarkan empat unsur utama SN-Dikti antara lain:

Tabel 8. Unsur Utama SN-Dikti CPL Prodi Ilmu Politik UWKS

	Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap (S)	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, moral, dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
	S2	Menjunjung tinggi nilai demokrasi, keadilan sosial, keberagaman, hak asasi manusia, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
	S3	Memiliki sikap profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan adaptif dalam menjalankan pekerjaan di bidang politik, pemerintahan, dan masyarakat.
	S4	Memiliki kepedulian sosial, semangat pemberdayaan masyarakat, serta kemampuan bekerja sama dalam lingkungan multikultural dan multidisipliner.
	S5	Memiliki komitmen terhadap pengembangan demokrasi, partisipasi publik, dan pembangunan sosial-politik yang berkelanjutan.
Pengetahuan (P)	P1	Menguasai konsep, teori, dan pendekatan ilmu politik meliputi politik lokal, demokrasi, pemerintahan, kebijakan publik, kepartaian, kepemiluan, hubungan negara dan masyarakat, serta komunikasi politik.
	P2	Menguasai konsep tata kelola pemerintahan, demokrasi lokal, civil society, dan pembangunan partisipatif.
	P3	Menguasai metode penelitian politik, analisis data sosial-politik, statistik politik, dan teknik pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif.
	P4	Menguasai perkembangan politik digital, media politik, teknologi informasi, dan transformasi demokrasi di era digital.
	P5	Menguasai konsep advokasi sosial-politik, pemberdayaan masyarakat, resolusi konflik, dan gerakan sosial.
	P6	Menguasai konsep inovasi sosial, transformasi digital, kolaborasi

		multiplikasi, dan pengembangan proyek demokrasi berbasis kebutuhan masyarakat.
Keterampilan Umum (KU)	KU1	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu politik dan penyelesaian persoalan sosial-politik.
	KU2	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data sosial-politik.
	KU3	Mampu menyusun karya ilmiah, policy brief, laporan penelitian, dan dokumen analisis politik secara akademik dan profesional.
	KU4	Mampu berkomunikasi secara efektif, persuasif, dan profesional dalam konteks akademik, organisasi, pemerintahan, dan masyarakat.
	KU5	Mampu bekerja sama dalam tim multidisipliner dan lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan sosial-politik.
	KU6	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan media digital dalam pembelajaran, penelitian, komunikasi politik, dan pengembangan inovasi sosial.
	KU7	Mampu mengembangkan jejaring kerja profesional dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial-politik dan dunia kerja.
Keterampilan Khusus (KK)	KK1	Mampu menganalisis fenomena politik, demokrasi, pemerintahan, dan kebijakan publik menggunakan teori, pendekatan, dan metode ilmu politik.
	KK2	Mampu menyusun rekomendasi kebijakan dan policy brief berdasarkan hasil analisis sosial-politik dan kebutuhan masyarakat.
	KK3	Mampu merancang dan melaksanakan penelitian politik menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, maupun digital.
	KK4	Mampu melakukan analisis data sosial-politik, survey politik, polling, dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan.
	KK5	Mampu mengelola komunikasi politik, media digital, kampanye publik, dan strategi komunikasi politik secara etis dan profesional.
	KK6	Mampu merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, advokasi sosial-politik, dan penguatan civil society secara partisipatif.
	KK7	Mampu mengelola tata kelola demokrasi, kepartaian, pemilihan, dan pemerintahan daerah secara profesional dan akuntabel.
	KK8	Mampu memanfaatkan teknologi digital dan inovasi sosial dalam pengembangan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat.
	KK9	Mampu merancang dan mengelola proyek inovasi demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.
	KK10	Mampu menunjukkan kepemimpinan, tanggung jawab profesional, dan etika politik dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang sosial-politik.

Dalam penyusunan kurikulum Outcome-Based Education (OBE), salah satu bagian yang wajib dimuat adalah matriks keterkaitan antara CPL Program Studi dengan unsur Capaian Pembelajaran SN-Dikti, yaitu Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU), dan Keterampilan Khusus

(KK). Meskipun CPL telah dirumuskan secara integratif, setiap CPL tetap harus dapat ditelusuri (traceable) terhadap unsur-unsur SN-Dikti.

Tabel 9. Matriks Kesesuaian CPL dan SN Dikti

CPL	CPL Program Studi	SN Dikti			
		Sikap (S)	Pengetahuan (P)	Keterampilan Umum (KU)	Keterampilan Khusus (KK)
CPL-1	Mampu menunjukkan sikap profesional, berintegritas, menjunjung tinggi nilai agama, etika akademik, nilai-nilai Kewijayakusumaan, demokrasi, hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, serta semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	S1, S2, S3, S4, S5	-	KU5, KU7	KK10
CPL-2	Mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan konsep, teori, serta pendekatan ilmu politik untuk memahami fenomena politik, demokrasi, pemerintahan, kebijakan publik, hubungan negara dan masyarakat, serta dinamika politik lokal, nasional, dan global secara kritis, komprehensif, dan berwawasan global.	-	P1, P2	KU1	KK1
CPL-3	Mampu menerapkan metode penelitian ilmu politik, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan analisis data dalam menghasilkan kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, dan solusi berbasis bukti (evidence-based policy) yang bermanfaat bagi masyarakat.	-	P3, P4	KU1, KU2, KU3, KU6	KK2, KK3, KK4
CPL-4	Mampu menganalisis, merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, demokrasi, pemilihan, dan kepartaian secara profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat.	S2, S3	P1, P2	KU2, KU4	KK1, KK2, KK7
CPL-5	Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat, penguatan civil society, advokasi sosial-politik, serta pembangunan partisipatif yang mendukung demokrasi,	S4, S5	P2, P5	KU5, KU7	KK6

	pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.				
CPL-6	Mampu memanfaatkan teknologi digital, komunikasi politik, media sosial, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence), dan inovasi sosial secara etis, adaptif, dan bertanggung jawab dalam analisis politik, tata kelola pemerintahan, pendidikan politik, serta penguatan partisipasi masyarakat di era transformasi digital.	S3	P4	KU6	KK5, KK8
CPL-7	Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisiplin, menunjukkan kepemimpinan, beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun jejaring kerja sama nasional dan internasional untuk mendukung profesionalisme di bidang politik, pemerintahan, dan organisasi masyarakat.	S3, S4	-	KU4, KU5, KU7	KK10
CPL-8	Mampu mengembangkan inovasi serta menghasilkan solusi kreatif terhadap berbagai persoalan politik, pemerintahan, demokrasi, dan pembangunan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, berbasis riset, berorientasi pada kemajuan bangsa, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.	S3, S5	P2, P5	KU1, KU2, KU5, KU6	KK6, KK8

VIII. MATRIKS DAN PETA KURIKULUM

Tabel 10. Matrik hubungan CPL Program Studi dan Profil Lulusan Program Studi Ilmu Politik

Kode CPL	Deskripsi CPL	Political and Policy Analyst	Democratic Governance and Electoral Specialist	Community Empowerment and Sociopolitical Innovator
CPL-1	Mampu menunjukkan sikap profesional, menjunjung tinggi etika akademik, nilai demokrasi, hak asasi manusia, integritas, tanggung jawab sosial, serta semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	✓	✓	✓
CPL-2	Mampu menjelaskan dan menganalisis konsep, teori, serta pendekatan ilmu politik untuk memahami fenomena politik, demokrasi, pemerintahan, kebijakan publik, hubungan negara dan masyarakat, serta dinamika politik lokal, nasional, dan global secara kritis dan komprehensif.	✓	✓	✓
CPL-3	Mampu menerapkan metode penelitian ilmu politik, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data dalam menghasilkan kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, dan solusi berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).	✓	✓	✓
CPL-4	Mampu menganalisis, merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, demokrasi, pemilihan, dan kepartaian secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.	✓		
CPL-5	Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat, penguatan <i>civil society</i> , advokasi sosial-politik, serta pembangunan partisipatif yang mendukung demokrasi dan pencapaian SDGs.			✓
CPL-6	Mampu memanfaatkan teknologi digital, komunikasi politik, media sosial, kecerdasan artifisial (<i>Artificial Intelligence</i>), dan inovasi sosial dalam analisis politik, tata kelola pemerintahan, pendidikan politik, serta penguatan partisipasi masyarakat.	✓	✓	✓
CPL-7	Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisiplin,	✓	✓	✓

	menunjukkan kepemimpinan, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis, serta membangun jejaring profesional dalam bidang politik, pemerintahan, dan organisasi masyarakat.			
CPL-8	Mampu mengembangkan inovasi dan menghasilkan solusi kreatif terhadap berbagai persoalan politik, pemerintahan, demokrasi, dan pembangunan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, berbasis riset, serta berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat.		✓	✓

IX. PENETAPAN BAHAN KAJIAN, PEMBENTUKAN MATA KULIAH, DAN STRUKTUR MATA KULIAH

9.1 Penetapan Bahan Kajian

Ketujuh bidang Body of Knowledge tersebut membentuk suatu sistem keilmuan yang saling terintegrasi.

Tabel 11. Body of Knowledge Program Studi S1 Ilmu Politik UWKS

No.	Body of Knowledge	Fokus Kajian	Cakupan Materi	Kontribusi terhadap Profil Lulusan
1	Political Science Foundation	Landasan filosofis, teoritis, dan konseptual ilmu politik	Filsafat ilmu, pemikiran politik, teori politik, ideologi, etika politik, HAM, demokrasi	Seluruh profil lulusan
2	Political Research and Policy Analysis	Penelitian politik dan analisis kebijakan berbasis bukti	Metode penelitian, statistik politik, survei, polling, analisis data, <i>policy brief</i> , <i>evidence-based policy</i>	Political and Policy Analyst
3	Local Politics, Democratic Governance and Electoral Studies (<i>Center of Excellence</i>)	Politik lokal, demokrasi, pemilihan, dan tata kelola pemerintahan	Politik lokal, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, desentralisasi, demokrasi lokal, kepartaian, sistem pemilu, perilaku pemilih	Democratic Governance and Electoral Specialist
4	Public Policy and Governance	Kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan	Kebijakan publik, analisis kebijakan, <i>good governance</i> , <i>collaborative governance</i> , <i>e-government</i> , pelayanan publik	Political and Policy Analyst; Democratic Governance and Electoral Specialist
5	Digital Politics, Political Communication and Data Analytics	Transformasi digital dalam politik dan komunikasi	Komunikasi politik, <i>political branding</i> , <i>public relations</i> , media sosial, AI, <i>big data politics</i> , analisis data politik	Seluruh profil lulusan
6	Community Empowerment and Democratic Innovation	Pemberdayaan masyarakat dan inovasi demokrasi	Pemberdayaan masyarakat, <i>civil society</i> , gerakan sosial, advokasi, resolusi konflik, SDGs, <i>civic-tech</i> , inovasi sosial	Community Empowerment and Sociopolitical Innovator
7	Comparative Politics, Global Governance and Geopolitics	Politik komparatif dan dinamika politik global	Perbandingan politik, politik global, geopolitik, diplomasi, organisasi internasional, <i>global governance</i>	Seluruh profil lulusan

Political Science Foundation menjadi dasar penguasaan teori dan konsep ilmu politik; Political Research and Policy Analysis memperkuat kemampuan riset dan analisis kebijakan; Local Politics, Democratic Governance and Electoral Studies menjadi ciri khas keilmuan program studi; Public Policy and Governance memperkuat kompetensi tata kelola pemerintahan; Digital Politics, Political Communication and Data Analytics menjawab tantangan transformasi digital; Community Empowerment and Democratic Innovation menghubungkan ilmu politik dengan pemberdayaan masyarakat; sedangkan Comparative Politics, Global Governance and Geopolitics memberikan perspektif komparatif dan global. Secara keseluruhan, struktur ini memastikan keterpaduan antara

profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, dan proses pembelajaran sesuai prinsip Outcome-Based Education (OBE) serta memperkuat identitas Program Studi Ilmu Politik UWKS sebagai pusat kajian Politik Lokal dan Tata Kelola Demokrasi.

Tabel 12. Bahan Kajian dan Penetapan Mata Kuliah

Pengelompokan Bidang (<i>Body of Knowledge</i>)	Kode CP	Bahan Kajian		Mata Kuliah	
		Kode	Uraian	Nama MK	SKS
Political Science Foundation	CPL-1 CPL-2		Landasan filosofis, teoritis, dan konseptual ilmu politik. Memberikan landasan filosofis, etika politik, demokrasi, HAM, dan nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar pembentukan karakter lulusan. Mengembangkan kompetensi penelitian, analisis data, survei politik, polling, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.	Dasar-Dasar Ilmu Politik	3
				Pengantar Sosiologi	3
				Filsafat Ilmu dan Politik	3
				Etika Politik	3
				Pemikiran Politik	3
				Anti Korupsi dan Integritas Publik	3
				Sistem Politik Indonesia	3
				Teori Politik	3
				Ideologi, Gerakan Politik, dan Agama	3
				Hak Asasi Manusia dan Demokrasi	2
				Ekonomi Politik	3
				Political Global South	3
Political Research and Policy Analysis	CPL-3 CPL-8		Penelitian politik dan analisis kebijakan berbasis bukti. Membentuk kemampuan konseptual dalam menganalisis fenomena politik lokal, nasional, dan global. Membentuk kompetensi dalam analisis kebijakan, tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan pemilihan.	Metode Penulisan Ilmiah	3
				Metode Penelitian Sosial	3
				Statistik Sosial	3
				Metode Penelitian Kualitatif I. Politik	3
				Metode Penelitian Kuantitatif I. Politik	3
				Analisis Data Politik	2
Local Politics, Democratic Governance and Electoral Studies (<i>Center of Excellence</i>)	CPL-2 CPL-4		Politik lokal, demokrasi, pemilihan, dan tata kelola pemerintahan. Mengembangkan kemampuan advokasi, pemberdayaan masyarakat, civil society, inovasi demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan.	Kepemimpinan dan Kekuatan Politik	3
				Politik Lokal dan Otonomi Daerah	3
				Tata Kelola Pemerintahan	3
				Politik Perkotaan	2
				Sistem Pemilu dan Kepartaian	3
				Pemerintahan Desa dan Demokrasi Lokal	3
				Perilaku Pemilih dan Politik Elektoral	2
				Legislatif dan Perwakilan Politik	3
				Ekologi Politik	3
				Tata Kelola dan Pembangunan Desa	2
				Manajemen Kampanye Politik	2

				Survey Politik dan Polling	3
				Kepemimpinan dan Kekuatan Politik	3
Public Policy and Governance	CPL-4 CPL-8		Kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Mengembangkan kompetensi komunikasi politik digital, AI, media sosial, data analytics, dan transformasi demokrasi digital.	Kebijakan Publik	3
				Analisis Kebijakan Publik	3
				E-Government	3
				Collaborative Governance	2
				Politik Hukum dan Konstitusi	3
				Proses Politik dan Legal Drafting	3
Digital Politics, Political Communication and Data Analytics	CPL-6 CPL-7		Transformasi digital dalam politik dan komunikasi. Mengembangkan soft skills, komunikasi publik, kepemimpinan, jejaring profesional, dan kolaborasi multipihak.	Komunikasi Publik	3
				Komunikasi Politik	3
				Media Digital dan Politik	2
				Diplomasi dan Negosiasi Politik	3
				Politik Digital dan Artificial Intelligence	3
Community Empowerment and Democratic Innovation	CPL-5 CPL-7 CPL-8		Pemberdayaan masyarakat dan inovasi demokrasi. Mengintegrasikan riset, kebijakan, dan inovasi sosial dalam penyelesaian persoalan politik dan pemerintahan	Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan SDG's	2
				Projek, Riset dan Inovasi Politik	2
				Politik dan Gender	3
				Pembangunan Politik	3
				Politik Identitas dan Multikulturalisme	3
				Resolusi Konflik Politik	3
				Kewirausahaan Sosial Politik	2
				Politik dan Kesejahteraan Sosial	2
Comparative Politics, Global Governance and Geopolitics	CPL-2		Politik komparatif dan dinamika politik global	Politik Luar Negeri Indonesia	3
				Teori dan Metode Perbandingan Politik	3
				Politik Global dan Geopolitik	3

X. STRUKTUR MATA KULIAH

Tabel 13. Daftar Mata Kuliah, SKS, dan Sebaran pada Semester

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Teori	Praktikum	Status		Prasyarat
						Wajib	Pilihan	
Semester 1								
1	UNO-102	Agama Islam	2	2	0	✓		
2	UNO-112	Pancasila	2	2	0	✓		
3	UNO-311	Bahasa Indonesia	2	2	0	✓		
4	UNO-110	Wawasan Lingkungan	2	2	0	✓		
5	SPO-315	Dasar-Dasar Ilmu Politik	3	3	0	✓		
6	SPO-112	Dasar-Dasar Sosiologi	3	3	0	✓		
7	SPP-126	Etika Politik	3	3	0	✓		
8	SPP-127	Filsafat Ilmu dan Politik	3	3	0	✓		
Jumlah			20	20	0			
Semester 2								
1	UNO-201	Kewarganegaraan	2	2	0	✓		
2	SPO-316	Bahasa Inggris (for Special Purpose)	3	3	0	✓		
3	SPO-307	Metode Penelitian Sosial	3	3	0	✓		
4	SPO-318	Komunikasi Publik	3	3	0	✓		
5	SPP-254	Sistem Politik Indonesia	3	3	0	✓		Dasar-Dasar Ilmu Politik
6	SPP-252	Pemikiran Politik	3	3	0	✓		
7	SPP-253	Anti Korupsi dan Integritas Publik	3	3	0	✓		
Jumlah			20	20	0			
Semester 3								
1	SPO-313	Pengantar Statistik Sosial	3	3	0	✓		
2	SPP-317	Metode Penulisan dan Publikasi Ilmiah	3	3	0	✓		
3	SPP-522	Teori Politik	3	3	0	✓		Sistem Politik Indonesia
4	SPP-318	Kekuatan Politik Indonesia	3	3	0	✓		
5	SPP-319	Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik	3	3	1	✓		Metode Penelitian Sosial
6	SPP-602	Ekonomi Politik	3	3	0	✓		
7	SPP-320	Politik Lokal dan Otonomi Daerah	3	3	0	✓		
8	SPP-321	Ideologi, Gerakan Politik, dan Agama	3	3	1		✓	
9	SPP-322	Hak Asasi Manusia dan Demokrasi	3	3	0		✓	
Jumlah			27	27	2			
Semester 4								
1	UNO-902	KewijayaKusumaan	2	2	0	✓		
2	SPP-458	Politik dan Gender	3	3	0	✓		

3	SPP-511	Kebijakan Publik	3	3	0	✓		
4	SPP-451	Komunikasi Politik	3	3	0	✓		
5	SPP-459	Tata Kelola Pemerintahan	3	3	0	✓		
6	SPP-460	Metode Penelitian Kuantitatif Ilmu Politik	3	2	1	✓		Statistik Sosial
7	SPP-462	Politik Luar Negeri Indonesia	3	3	0	✓		
8	SPP-461	Analisis Data Politik	2	2	0		✓	
9	SPP-463	Media Digital dan Politik	3	2	1		✓	
10	SPP-457	Politik Perkotaan	3	2	1		✓	
Jumlah			28	25	3			
Semester 5								
1	SPP-641	Pembangunan Politik	3	2	1	✓		
2	SPP-573	Sistem Pemilu dan Kepartaian	3	2	1	✓		
3	SPP-574	Analisis Kebijakan Publik	3	3	0	✓		
4	SPP-660	Pemerintahan Desa dan Demokrasi Lokal	3	2	1	✓		
5	SPP-575	Perilaku Pemilih dan Politik Elektoral	3	3	0	✓		
6	SPP-576	Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan SDG's	3	2	1		✓	
7	SPP-577	Politik Identitas dan Multikulturalisme	3	2	1		✓	
8	SPP-578	Political Global South	3	2	1		✓	
9	SPP-579	Diplomasi dan Negosiasi Politik	3	2	1		✓	
10	SPP-580	Legislatif dan Perwakilan Politik	3	2	1		✓	
11	SPP-581	Ekologi Politik	3	2	1		✓	
12	SPP-582	Politik Digital dan Artificial Intelligence	3	2	1		✓	
Jumlah			33	24	9			
Semester 6								
1	SPP-680	Teori dan Metode Perbandingan Politik	3	2	1	✓		
2	SPP-681	Politik Global dan Geopolitik	3	3	0	✓		
3	UNO-613	KKN	2	0	2	✓		
4	SPP-682	Seminar Proposal Penelitian	3	2	1	✓		
5	SPP-683	Projek, Riset dan Inovasi Politik	3	2	1		✓	
6	SPP-684	E-Government	3	2	1		✓	
7	SPP-685	Resolusi Konflik Politik	3	2	1		✓	
8	SPP-686	Tata Kelola dan Pembangunan Desa	3	2	1		✓	
9	SPP-687	Collaborative Governance	3	2	1		✓	
10	SPP-689	Manajemen Pemenangan Pemilu	3	2	1		✓	
Jumlah			29	19	10			
Semester 7								
1	SPP-682	Seminar Proposal Penelitian	3	2	1	✓		

2	SPP-728	Tugas Akhir	6	0	6	✓		
3	SPP-729	Politik Hukum dan Konstitusi	3	3	0		✓	
4	SPP-730	Proses Politik dan Legal Drafting	3	2	1		✓	
5	SPP-731	Kewirausahaan Sosial Politik	2	1	1		✓	
6	SPP-732	Survey Politik dan Polling	3	2	1		✓	
7	SPP-723	Politik dan Kesejahteraan Sosial	3	2	1		✓	
Jumlah			23	13	11			
Semester 8								
1	SPP-728	Tugas Akhir	6	0	6	✓		
Jumlah			6	0	6			

XI. RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI

Implementasi hak belajar mahasiswa di luar program studi yang direncanakan meliputi empat kegiatan, yaitu:

1. Magang Bersertifikat
2. Pertukaran Mahasiswa
3. Penelitian/Riset
4. Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Pilihan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan sistem pelaksanaan kurikulum penunndukung program MBKM dan untuk mengakomodasi pengambilan SKS (Satuan Kredit Semester) di luar prodi / perguruan tinggi setara minimal 20 SKS. Adapun 5 pilihan kepada mahasiswa untuk mengakomodir pembelajaran program MBKM adalah sebagai berikut:

1. Pilihan I untuk mengakomodasi Mahasiswa yang memilih program MBKM
2. Pilihan II untuk mengakomodasi Mahasiswa yang tidak memilih program MBKM (Program Reguler).

Pengelompokan bentuk pembelajaran tersebut disosialisasikan kepada mahasiswa untuk secara sukarela melakukan pemilihan program MBKM maupun program regular, dengan tetap memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL,
2. dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya.
3. dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya.
4. kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (scientific vision) dan tuntutan bidang pekerjaan (market signal).

Pelaksanaan program MBKM di lingkup Program Studi Ilmu Politik memiliki persyaratan umum bagi mahasiswa sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Politik, tidak sedang cuti kuliah
2. Telah melakukan konsultasi dan pemilihan kelompok bentuk pembelajaran MBKM melalui dosen pembimbing akademik.
3. Mendapatkan persetujuan tertulis dari dosen pembimbing akademik.
4. Mendapatkan persetujuan tertulis dari mitra.

Tabel 14. Daftar Mata Kuliah/Kegiatan dan SKS

SEMESTER V-VII (MERDEKA)						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktik	Jumlah
Magang Bersertifikat						
Semester V						
1	SPP-576	Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan SDG's	3	2	1	3
2	SPP-577	Politik Identitas dan Multikulturalisme	3	2	1	3
3	SPP-580	Legislatif dan Perwakilan Politik	3	2	1	3
4	SPP-581	Ekologi Politik	3	2	1	3
5	SPP-582	Politik Digital dan Artificial Intelligence	3	2	1	3
Semester VI						
1	SPP-463	Media Digital dan Politik	3	2	1	3
2	SPP-684	E-Government	3	2	1	3

3	SPP-685	Resolusi Konflik Politik	3	2	1	3
4	SPP-686	Tata Kelola dan Pembangunan Desa	3	2	1	3
5	SPP-687	Collaborative Governance	3	2	1	3
Semester VII						
1	SPP-729	Politik Hukum dan Konstitusi	3	3	0	3
2	SPP-731	Kewirausahaan Sosial Politik	2	1	1	2
3	SPP-732	Survey Politik dan Polling	3	2	1	3
4	SPP-723	Politik dan Kesejahteraan Sosial	3	2	1	3
Jumlah SKS						41
Penelitian/Riset						
Semester V						
1	SPP-576	Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan SDG's	3	2	1	3
2	SPP-577	Politik Identitas dan Multikulturalisme	3	2	1	3
3	SPP-580	Legislatif dan Perwakilan Politik	3	2	1	3
4	SPP-581	Ekologi Politik	3	2	1	3
5	SPP-582	Politik Digital dan Artificial Intelligence	3	2	1	3
Semester VI						
1	SPP-463	Media Digital dan Politik	3	2	1	3
2	SPP-684	E-Government	3	2	1	3
3	SPP-685	Resolusi Konflik Politik	3	2	1	3
4	SPP-686	Tata Kelola dan Pembangunan Desa	3	2	1	3
5	SPP-687	Collaborative Governance	3	2	1	3
Semester VII						
1	SPP-729	Politik Hukum dan Konstitusi	3	3	0	3
2	SPP-731	Kewirausahaan Sosial Politik	2	1	1	2
3	SPP-732	Survey Politik dan Polling	3	2	1	3
4	SPP-723	Politik dan Kesejahteraan Sosial	3	2	1	3
Jumlah SKS						41
Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)						
Semester V						
1	SPP-576	Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan SDG's	3	2	1	3
2	SPP-577	Politik Identitas dan Multikulturalisme	3	2	1	3
3	SPP-580	Legislatif dan Perwakilan Politik	3	2	1	3
4	SPP-581	Ekologi Politik	3	2	1	3
5	SPP-582	Politik Digital dan Artificial Intelligence	3	2	1	3
Semester VI						
1	SPP-463	Media Digital dan Politik	3	2	1	3
2	SPP-684	E-Government	3	2	1	3
3	SPP-685	Resolusi Konflik Politik	3	2	1	3
4	SPP-686	Tata Kelola dan Pembangunan Desa	3	2	1	3
5	SPP-687	Collaborative Governance	3	2	1	3
Semester VII						
1	SPP-729	Politik Hukum dan Konstitusi	3	3	0	3
2	SPP-731	Kewirausahaan Sosial Politik	2	1	1	2
3	SPP-732	Survey Politik dan Polling	3	2	1	3
4	SPP-723	Politik dan Kesejahteraan Sosial	3	2	1	3
Jumlah SKS						41

Pertukaran Mahasiswa

Berdasarkan mata kuliah yang diprogram pada kampus sasaran pertukaran

XII. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Manajemen kurikulum Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dilaksanakan secara sistematis berdasarkan prinsip Outcome-Based Education (OBE) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), KKNI Level 6, dan standar APSIPOL. Pengelolaan kurikulum dilakukan oleh Program Studi bersama Fakultas, Gugus Penjaminan Mutu, dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Dalam proses penyusunannya, program studi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti alumni, pengguna lulusan, organisasi profesi, pemerintah, dan mitra kerja, sehingga kurikulum yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan ilmu politik, kebutuhan dunia kerja, serta dinamika masyarakat.

Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning) dengan mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran, seperti kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), penelitian, magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Setiap mata kuliah disusun berdasarkan keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), metode pembelajaran, dan asesmen sehingga seluruh proses pembelajaran berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala melalui evaluasi proses pembelajaran setiap semester, pengukuran ketercapaian CPL, evaluasi dosen oleh mahasiswa, tracer study, serta survei kepuasan pengguna lulusan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan kajian, mata kuliah, maupun struktur kurikulum secara berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkomitmen menjaga mutu kurikulum agar tetap adaptif terhadap perkembangan ilmu politik, kebijakan pendidikan tinggi, serta kebutuhan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pencapaian visi program studi sebagai Pusat Kajian Politik Lokal dan Tata Kelola Demokrasi.

XIII. TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA

13.1 Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) dilaksanakan secara terpusat melalui sistem Admisi UWKS yang dikelola oleh universitas. Sistem penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan secara daring (online) melalui portal resmi Admisi UWKS sehingga seluruh proses pendaftaran, seleksi, pengumuman, hingga registrasi ulang dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada kondisi tertentu, proses seleksi hingga pengumuman hasil dapat diselesaikan dalam waktu satu hari sehingga memberikan kepastian layanan kepada calon mahasiswa.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyediakan beberapa jalur penerimaan mahasiswa yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, prestasi, maupun pengalaman kerja calon mahasiswa. Setiap jalur memiliki mekanisme seleksi dan persyaratan yang berbeda, namun tetap mengacu pada prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

13.1.1 Jalur Reguler

Jalur Reguler merupakan jalur penerimaan utama yang diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke Program Studi S1 Ilmu Politik. Seleksi dilakukan melalui ujian masuk yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ujian seleksi bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik dasar, potensi belajar, serta kesiapan calon mahasiswa dalam mengikuti pendidikan tinggi. Jalur ini memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon mahasiswa tanpa membedakan asal sekolah maupun wilayah asal.

Melalui jalur reguler, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan akademik yang memadai sebagai dasar dalam mengikuti proses pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), sehingga mampu mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi.

13.1.2 Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik selama menempuh pendidikan di sekolah menengah. Seleksi dilakukan berdasarkan evaluasi nilai rapor, prestasi akademik, maupun prestasi nonakademik yang dibuktikan melalui sertifikat atau dokumen pendukung lainnya.

Prestasi yang dapat menjadi pertimbangan antara lain prestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni, kepemimpinan, organisasi, penelitian ilmiah remaja, maupun kompetisi lainnya di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional. Melalui jalur ini, universitas memberikan apresiasi kepada peserta didik berprestasi sekaligus mendorong budaya unggul dan kompetitif sejak awal memasuki perguruan tinggi.

13.1.3 Jalur Khusus

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya juga menyediakan Jalur Khusus yang memberikan fleksibilitas bagi calon mahasiswa dengan karakteristik tertentu. Jalur ini meliputi:

a. Jalur UTBK

Calon mahasiswa dapat menggunakan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai salah satu dasar seleksi masuk tanpa harus mengikuti ujian seleksi internal universitas. Penggunaan nilai UTBK bertujuan memberikan alternatif jalur penerimaan bagi lulusan yang telah mengikuti seleksi nasional dan memiliki capaian akademik yang memenuhi persyaratan universitas.

b. Jalur Pindahan

Jalur Pindahan diperuntukkan bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain dan ingin melanjutkan studi di Program Studi S1 Ilmu Politik UWKS. Proses seleksi dilakukan melalui evaluasi dokumen akademik, termasuk transkrip nilai, kurikulum asal, serta kesesuaian capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditempuh. Mata kuliah yang memiliki kesetaraan kompetensi dapat dikonversi sesuai ketentuan akademik universitas.

c. Jalur Karyawan

Jalur Karyawan dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah bekerja agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Sistem pembelajaran pada jalur ini disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa pekerja melalui pengaturan jadwal perkuliahan yang lebih fleksibel tanpa mengurangi standar mutu akademik maupun capaian pembelajaran lulusan.

13.1.4 Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Sebagai implementasi kebijakan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyelenggarakan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Jalur ini memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pengalaman kerja, pelatihan profesional, sertifikasi kompetensi, pendidikan formal sebelumnya, maupun pengalaman belajar lainnya yang relevan dengan Program Studi S1 Ilmu Politik.

Calon mahasiswa yang mengikuti jalur RPL wajib memenuhi persyaratan administrasi berupa ijazah pendidikan terakhir minimal SMA/ sederajat, surat keterangan pengalaman kerja atau portofolio profesional, sertifikat pelatihan atau kursus yang relevan, serta transkrip nilai apabila sebelumnya pernah menempuh pendidikan tinggi.

Selanjutnya dilakukan proses asesmen oleh tim asesor RPL untuk menentukan kesesuaian pengalaman belajar dengan capaian pembelajaran mata kuliah pada kurikulum Program Studi Ilmu Politik. Hasil asesmen menjadi dasar pengakuan dan konversi Satuan Kredit Semester (SKS), sehingga mahasiswa tidak perlu mengulang mata kuliah yang kompetensinya telah terbukti dikuasai. Melalui mekanisme tersebut, jalur RPL memberikan beberapa keuntungan, antara lain memperpendek masa studi, meningkatkan efisiensi biaya pendidikan, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pekerja profesional untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa harus memulai studi dari awal.

13.2 Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru

Seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui sistem **Admisi UWKS** dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Registrasi Akun**

Calon mahasiswa membuat akun pada portal Admisi UWKS menggunakan alamat surat elektronik (email) dan nomor telepon aktif sebagai identitas pendaftaran.

- 2. Pemilihan Jalur dan Program Studi**

Setelah berhasil masuk ke sistem, calon mahasiswa memilih jalur penerimaan yang sesuai serta menentukan Program Studi S1 Ilmu Politik sebagai program studi tujuan.

- 3. Pembayaran dan Pengisian Biodata**

- 4.** Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya formulir pendaftaran, melengkapi biodata, serta mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jalur yang dipilih, seperti ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL), KTP, Kartu Keluarga, maupun dokumen pendukung lainnya.

- 5. Pelaksanaan Seleksi**

Bagi jalur yang mensyaratkan ujian masuk, peserta mengikuti tes seleksi secara daring melalui akun Admisi UWKS. Sementara itu, pada Jalur Prestasi dan Jalur RPL, proses seleksi dilakukan melalui verifikasi dokumen dan asesmen sesuai ketentuan yang berlaku.

- 6. Pengumuman Hasil Seleksi**

Hasil seleksi diumumkan melalui akun Admisi UWKS. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh pemberitahuan resmi untuk melanjutkan ke tahap registrasi ulang.

7. Registrasi Ulang

Mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan herregistrasi dengan melengkapi dokumen administrasi dan menyelesaikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan universitas.

13.3 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru di Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, keadilan, dan inklusivitas. Keberagaman jalur penerimaan memberikan kesempatan yang sama bagi lulusan baru, mahasiswa pindahan, pekerja profesional, maupun peserta Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk memperoleh akses pendidikan tinggi yang bermutu. Sistem ini juga mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Outcome-Based Education (OBE), serta pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, berdaya saing, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.

 Rektor,

Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, MSi.